

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP RASIO GINI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2023



Disusun Oleh :

Nama : Julia Nadine Aurora Butar Butar
Nomor Mahasiswa : 143210013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

2025

**ANALISIS PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH,
ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN JUMLAH PENDUDUK
MISKIN TERHADAP RASIO GINI DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2023**

SKRIPSI

Untuk Penulisan Skripsi S1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta



Disusun Oleh :

Nama : Julia Nadine Aurora Butar Butar

Nomor Mahasiswa : 143210013

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

2025

**ANALISIS PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH,
ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN JUMLAH PENDUDUK
MISKIN TERHADAP RASIO GINI DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2023**



Skripsi ini disetujui pada tanggal01.. Mei 2025

Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Suharsih, S.E., M.Si.
NIP. 196912192021212008

**ANALISIS PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH,
ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN JUMLAH PENDUDUK
MISKIN TERHADAP RASIO GINI DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2023**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nama : Julia Nadine Aurora Butar Butar

Nomor Mahasiswa : 143210013

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal⁰².....Mei 2025

Ketua Sidang/Penguji I

Pembimbing/Penguji II

Prof. Didit Welly Udjianto, MS

NIP. 195906201986031001

Dr. Sri Suharsih, S.E., M.Si.

NIP. 196912192021212008

Penguji III

Penguji IV

Dra. Sri Rahayu Budi H, M.Si.

NIP. 196006191985032001

Asih Sri Winarti, S.E., M.Si.

NIP. 197409242021212004

Diterima dan dinyatakan sah sebagai Skripsi pada tanggal.....¹⁵.....Mei 2025

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta

Dr. E. Diah Lufi Wijayanti, S.E., M.Si.

NIP. 197203112021212004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julia Nadine Aurora Butar Butar
Nomor Mahasiswa : 143210013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, ANGKA HARAPAN HIDUP, JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP RASIO GINI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2023

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman dan atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Mei 2025

Yang menyatakan


JULIA NADINE AURORA BUTAR BUTAR
NIM: 143210013

MOTTO

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri”

(Amsal 3:5)

“Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil”

(Lukas :37)

“Be humble, for you are made of earth. Be noble, for you are made of stars”

(Bapak & Ibu)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini saya mempersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang selalu berada di sekeliling saya, yang selalu memberikan dukungan doa, dan semangat untuk saya dan kelancaran skripsi saya:

1. Mengawali lembar persembahan ini, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Rahmat dan karunia-Nya telah membimbing setiap langkah dalam penyusunan karya ini, dan atas berkat serta kemudahan dari-Nya, karya ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan atas limpahan ilmu, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan.
2. Terima kasih kepada orang tua saya, Bapak Rolan Antonius Butar Butar dan Ibu Henri Agnes Paulina Manalu, dengan hati yang penuh cinta dan rasa hormat yang tak terhingga, karya ini dipersembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta. Kalian adalah matahari dan rembulan dalam kehidupan penulis, sumber kasih sayang yang tak pernah lekang oleh waktu. Setiap peluh yang kalian teteskan, setiap doa yang kalian panjatkan, dan setiap pengorbanan yang kalian berikan adalah fondasi kokoh yang menopang setiap langkah penulis. Kata-kata tak akan mampu menggambarkan betapa besar arti kehadiran kalian. Semoga karya ini menjadi setitik kebahagiaan yang dapat penulis rangkai untuk membalas kebaikan hati kalian yang tak terukur.
3. Dengan rasa terima kasih, penulis sampaikan kepada Bang Gilbert dan Rafael atas kebaikan serta dukungan yang sungguh tak ternilai harganya. Kepada Kak Helen, meskipun raga beliau telah tiada, kasih sayang beliau tetap hidup dan membekas dalam setiap sudut kenangan, dan pelajaran berharga dari beliau akan abadi dalam ingatan penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Vico dan Mico atas kesetiaan serta kehangatan yang senantiasa hadir dalam hidup penulis.
4. Kepada keluarga besar saya (Pinompar Opung Winda dan Pinompar Opung Helen), dengan segenap rasa syukur dan cinta, karya ini penulis persembahkan kepada seluruh keluarga besar. Setiap doa, dukungan, dan kebersamaan kalian adalah kekuatan tak ternilai dalam penyelesaian karya ini.

5. Terima kasih yang tulus, karya ini penulis persembahkan kepada Ibu Dr. Sri Suharsih, S.E., M.Si. Bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan penelitian ini sungguh tak ternilai harganya. Kesabaran, ketelitian, dan motivasi yang Ibu curahkan telah menjadi pendorong utama bagi terselesaikannya karya ini.
6. Terima kasih kepada jajaran dosen pengurus Jurusan Ekonomi Pembangunan atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi.
7. Terima kasih kepada “RiChiNELiS dan Cebar” sahabat-sahabat terdekat yang telah mewarnai masa remaja penulis dengan tawa, dukungan, serta kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih atas persahabatan yang tulus dan kenangan indah yang akan senantiasa penulis hargai.
8. Terima kasih kepada “Daya Juang Tinggi dan Roy” atas kehangatan kebersamaan yang telah terjalin. Lebih dari sekadar teman, kalian adalah keluarga jauh yang saling menguatkan dalam kerasnya lika-liku perkuliahan. Setiap cerita yang terbagi, tawa yang menghangatkan suasana yang tak pernah padam telah menjadi sumber kekuatan tak ternilai dalam menyelesaikan karya ini. Kehadiran kalian telah memberikan warna dan dukungan yang luar biasa dalam setiap langkah perjalanan akademik dan pribadi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam setiap babak kehidupan ini.
9. Terima kasih kepada “Tanjung Oye”, kebersamaan dan semua kenangan tak terlupakan yang kita ukir bersama.
10. Terima kasih kepada teman-teman “HIMASEPA 2023” dedikasi dan kerja keras selama satu tahun kepengurusan. Semoga segala upaya kita memberikan dampak positif bagi himpunan dan anggotanya.
11. Kepada teman-teman angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dalam menempuh suka duka perkuliahan. Semoga tali persahabatan ini terus terjalin erat seiring langkah kita meraih kesuksesan di masa depan.
12. Penulis mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian karya ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, anugerah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Bonus Demografi, Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap PDRB Per Kapita di Pulau Jawa 2011-2022” Pada Kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan pemikiran maupun pemahaman serta bimbingan, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Ibu Dr. Sri Suharsih, S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, saran, motivasi, nasehat serta telah meluangkan waktunya untuk saya. Dalam memberikan arahan dan solusi dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar, Tenaga Pendidik, dan Karyawan khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah mendukung proses belajar saya selama kuliah.
3. Keluarga saya yang sangat saya sayangi, Orang tua saya, Kakak dan Adik saya. Terima kasih atas untaian doa, motivasi, dan segala bantuan yang tak ternilai harganya bagi saya.

Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya, semoga menjadi amal baik bagi kita semua. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi yang membaca. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini saya ucapkan terima kasih

Yogyakarta, Mei 2025

Penulis,

Julia Nadine Aurora
NIM. 143210013

INTISARI

Ketimpangan pendapatan adalah ketidakmerataan pendapatan yang diperoleh antar individu sehingga menimbulkan perbedaan kesejahteraan sosial. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari angka Rasio Gini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap rasio gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2023. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dari tahun 2010-2023 dan *cross section* 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah menggunakan *software* Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil analisis bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif terhadap rasio gini dan variabel Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh terhadap rasio gini.

Kata Kunci: Rasio Gini, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Jumlah Penduduk Miskin

ABSTRACT

Income inequality is the inequality of income obtained between individuals, resulting in differences in social welfare. Income inequality can be seen from the Gini Index figure. This study aims to analyze the effect of average length of schooling, life expectancy, and the number of poor people on income inequality in regencies/cities in North Sumatra Province in 2010-2023. This study uses panel data regression analysis which is a combination of time series data from 2010-2023 and cross sections of 33 in regencies/cities North Sumatra Province obtained from the Badan Pusat Statistik (BPS) and processed using Eviews 12 software. The results of this study indicate that the best model is the Fixed Effect Model. Based on the results of the analysis, the variables of average length of schooling and life expectancy have a negative effect on income inequality and the variable number of poor people has no effect on income inequality.

Keywords: *Gini Ratio, Average Length of Schooling, Life Expectancy, Number of Poor People*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Rasio Gini	17
2.1.2 Teori Human Capital	23
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi	23
2.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	24
2.1.5 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Rasio Gini	25
2.1.6 Angka Harapan Hidup (AHH)	26
2.1.7 Hubungan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rasio Gini.....	28
2.1.8 Jumlah Penduduk Miskin (JPM).....	29
2.1.9 Hubungan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan Rasio Gini	31

2.2	Penelitian Terdahulu.....	33
2.3	Kerangka Pemikiran Konseptual.....	35
2.4	Hipotesis Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Data dan Sumber Data	39
3.3	Alat Analisis	39
3.3.1	Estimasi Regresi Data Panel	40
3.3.2	Uji Spesifikasi Model.....	42
3.3.3	Uji Statistik	44
3.3.4	Uji Asumsi Klasik	46
3.4	Definisi Operasional Variabel	47
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian.....	49
4.1.1	Rasio Gini	49
4.1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	54
4.1.3	Angka Harapan Hidup (AHH)	59
4.1.4	Jumlah Penduduk Miskin (JPM).....	65
4.2	Analisis Data	70
4.2.1	Pemilihan Teknik Regresi Data Panel.....	70
4.2.2	Hasil Asumsi Klasik.....	71
4.2.3	Hasil Estimasi	73
4.2.4	Uji Hipotesis	74
4.3	Pembahasan.....	77
4.3.1	Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Rasio Gini... 77	
4.3.2	Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap Rasio Gini	78
4.3.3	Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin (JPM) terhadap Rasio Gini.. 79	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		81
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN.....		87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4. 1 Rasio Gini di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023 (Poin).....	50
Tabel 4. 2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023 (Tahun).....	55
Tabel 4. 3 Angka Harapan Hidup (AHH) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023 (Tahun).....	60
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023 (Jiwa).....	65
Tabel 4. 5 Uji Chow	70
Tabel 4. 6 Uji Hausman.....	71
Tabel 4. 7 Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas	73
Tabel 4. 9 Hasil Estimasi <i>Fised Effect Model</i>	74
Tabel 4. 10 Uji Parsial (Uji-t).....	74
Tabel 4. 11 Uji Simultan (Uji F)	76
Tabel 4. 12 Koefisien Determinasi (R^2)	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2019-2023	2
Gambar 1. 2	Rasio Gini di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Poin).....	4
Gambar 1. 3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Tahun).....	6
Gambar 1. 4	Angka Harapan Hidup (AHH) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Tahun).....	8
Gambar 1. 5	Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Jiwa).....	9
Gambar 2. 1	Kurva Lorenz.....	20
Gambar 2. 2	Kerangka Pemikiran Konseptual.....	36
Gambar 4. 5	Uji Normalitas	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	88
Lampiran 2 Hasil <i>Common Effect Model</i>	98
Lampiran 3 Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	99
Lampiran 4 Hasil <i>Random Effect Model</i>	100
Lampiran 5 Hasil Uji Chow	101
Lampiran 6 Hasil Uji Hausman.....	102
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas	103
Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinearitas	103
Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

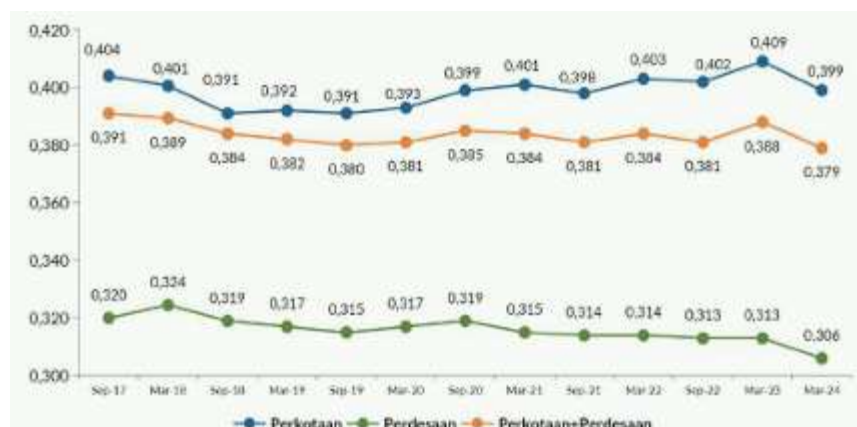
1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk setiap wilayah di Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Pada kondisi ini, pendapatan cenderung dinikmati oleh kelompok atas dan memiliki selisih yang cukup jauh dengan penduduk kelompok menengah dan bawah. Salah satu alat yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Rasio Gini, yang memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan di masyarakat. Ketimpangan pendapatan antar kelompok dapat diukur dengan menggunakan Rasio Gini. Rasio Gini dapat bernilai 0 hingga 1, di mana semakin kecil atau semakin angka mendekat indeks 0 berarti pendapatan antar kelompok semakin kecil (pemerataan sempurna), sedangkan semakin besar angka indeks atau semakin angka indeks mendekati 1 berarti semakin tinggi disparitas pendapatan penduduk di wilayah tersebut. (Kamaruddin, 2025).

Ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang diukur dengan rasio gini berada pada angka sekitar 0,395 menunjukkan tingkat ketimpangannya yang moderat. Jika dibandingkan dengan Brazil, yang memiliki rasio gini jauh lebih tinggi sekitar 0,55. Brazil menempatkan posisi sebagai salah satu negara dengan tingkat rasio gini dan ketimpangan wilayah yang parah di dunia. Rasio gini di Brazil disebabkan dengan pemindahan ibu kota menunjukkan bahwa pemindahan tersebut tidak efektif dalam mengurangi disparitas wilayah dan justru memperlebar kesenjangan ekonomi serta faktor-faktor seperti sejarah ketidaksetaraan sosial, akses pendidikan yang tidak merata, dan perbedaan dalam kesempatan kerja (Gozali & Zuliansyah, 2024). Selain itu, Singapura meskipun negara maju memiliki rasio gini sekitar 0,37 yang menunjukkan bahwa negara ini juga menghadapi ketimpangan pendapatan, meskipun pada tingkat lebih rendah dibandingkan Indonesia. Rasio gini di Singapura adalah salah satu masalah yang dihadapi

Singapura dan didorong oleh faktor-faktor seperti stratifikasi sosial yang mengakar dan keyakinan serta sikap yang mengakar terhadap kebijakan distribusi. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara orang Singapura termiskin dan terkaya mengkhawatirkan. (Dwindy, 2023). Analisis perbandingan ini menggambarkan bahwa meskipun rasio gini di Indonesia merupakan masalah yang mendesak, hal ini merupakan bagian dari konteks global yang lebih luas di mana berbagai negara mengalami tingkat ketimpangan yang bervariasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi yang unik.

Dilansir dari Worldometers tahun 2022, Indonesia merupakan peringkat 15 sebagai negara terluas di dunia, serta menempati peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Namun sayangnya, hingga saat ini pembangunan dan pusat perekonomian di Indonesia cenderung masih terpusat di wilayah Barat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Terpusatnya perekonomian dan pembangunan di Pulau Jawa, selain dapat memperparah ketimpangan antar wilayah, juga berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat yang disebabkan semakin tingginya kepadatan penduduk di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. (Sirait, 2022). Hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan faktor-faktor untuk mengurangi rasio gini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan perkembangan rasio gini di Indonesia September 2017-Maret 2024.



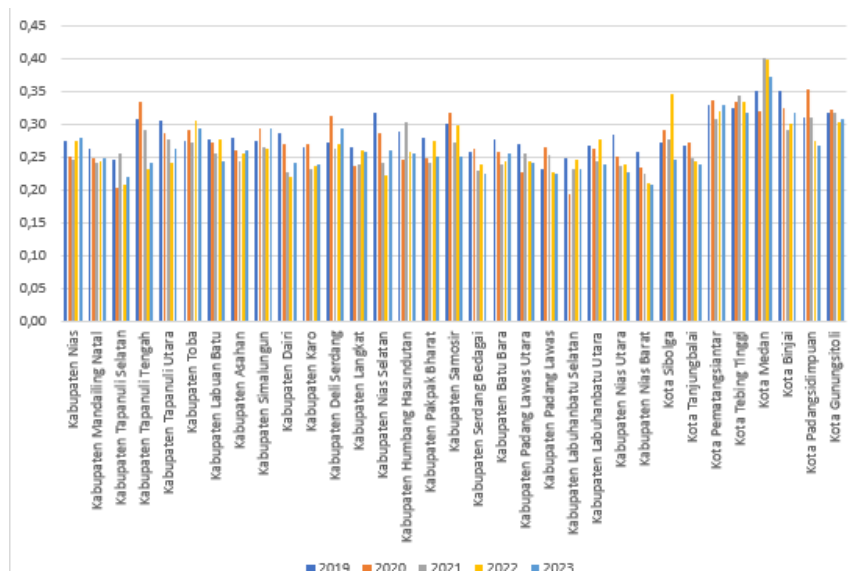
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 1. 1 Perkembangan Rasio Gini di Indonesia September 2017-Maret 2024

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dijelaskan, rasio gini setiap provinsi di Indonesia masih terjadi dan perbedaannya cukup tinggi. Di Indonesia rasio gini pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini adalah sebesar 0,379. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2023 yang sebesar 0,388 dan menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini rasio September 2022 yang sebesar 0,381. Pada saat Covid-19, angka rasio gini mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Namun, rasio gini Maret 2024 sudah menurun kembali menjadi 0,379. (BPS, 2023).

Provinsi Sumatera Utara, rasio gini menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam periode 5 tahun terakhir, mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Namun, meskipun terdapat tren perbaikan dalam beberapa daerah, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi. Kota Medan, sebagai pusat ekonomi memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di seluruh provinsi.

Penelitian yang membahas rasio gini di Indonesia, studi mengenai faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi Rasio Gini di Sumatera Utara masih terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek ekonomi makro, sementara hubungan antara pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan terhadap rasio gini belum banyak dikaji secara mendalam di tingkat provinsi (Fachruurrozi & Hasmarini, 2023). Selain itu, kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan data sebelum pandemi COVID-19, sehingga belum mencerminkan dampak jangka panjang pandemi terhadap rasio gini di Sumatera Utara.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Gambar 1. 2 Rasio Gini di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Poin)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat dijelaskan, data Rasio Gini di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, mencerminkan perubahan dalam tingkat rasio gini di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2019, beberapa daerah seperti Kota Medan dan Kota Binjai masih menunjukkan angka rasio gini yang relatif tinggi, masing-masing mencapai 0,35 dan 0,32, yang mengindikasikan ketimpangan yang cukup besar di wilayah perkotaan tersebut. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan di beberapa daerah, termasuk Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Nias Utara, dengan nilai rasio gini yang lebih rendah, seperti 0,19 dan 0,23, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi distribusi pendapatan.

Setelah beberapa waktu, beberapa daerah menunjukkan perbaikan dalam hal ketimpangan pendapatan. Misalnya, pada tahun 2021, meskipun Kota Medan masih memiliki nilai rasio gini yang cukup tinggi (0,40), beberapa kabupaten lain, seperti Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Asahan, mengalami penurunan ketimpangan dengan nilai sekitar 0,23-0,28. Pada tahun 2022 dan 2023, kecenderungannya relatif stabil, dengan banyak daerah menunjukkan angka rasio gini di bawah 0,30, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan. Namun, Kota Medan dan beberapa kabupaten lainnya masih

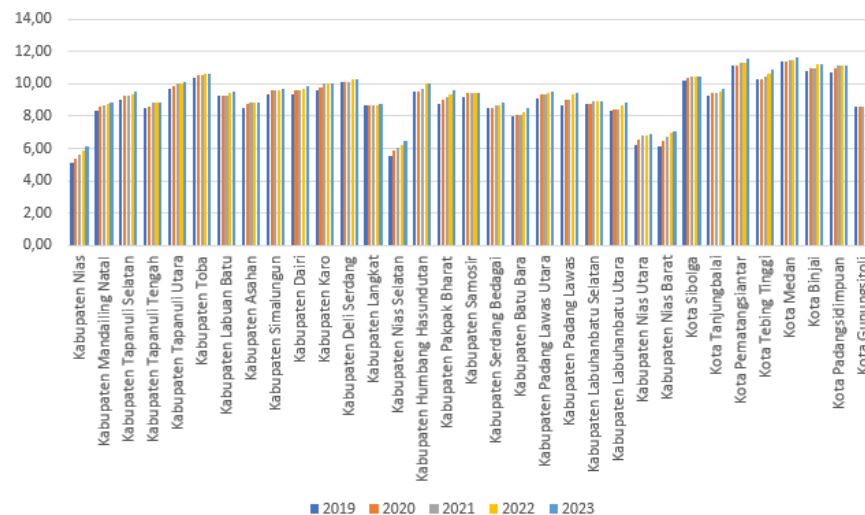
mencatatkan angka yang lebih tinggi, seperti 0,37 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa rasio gini masih tetap menjadi masalah signifikan, terutama di kota besar.

Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, terdapat tren perbaikan dalam beberapa daerah selama periode 2019 hingga 2023, tetapi rasio gini, terutama di wilayah perkotaan, masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam kebijakan ekonomi dan sosial di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rasio gini, khususnya pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.

Rasio gini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, tetapi juga oleh aspek sosial seperti pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi rasio gini. Pendidikan menjadi fondasi utama untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, maka akan semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak karena selama menempuh jenjang pendidikan mereka diberikan keterampilan, ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas (Tjiabrata et al., 2021). Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat menggunakan indikator rata-rata lama seseorang bersekolah. Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Namun, hingga saat ini, masih belum banyak penelitian yang menghubungkan Rata-Rata Lama Sekolah dengan rasio gini di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana tingkat pendidikan masyarakat berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi di provinsi ini.

Rata-Rata Lama Sekolah adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan keterampilan (Kamaruddin, 2025) individu, tetapi juga berkontribusi

pada peningkatan produktivitas dan pendapatan. Di Sumatera Utara, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, tantangan dalam hal kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan. Rata-Rata Lama Sekolah yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja, yang pada gilirannya dapat memperburuk rasio gini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

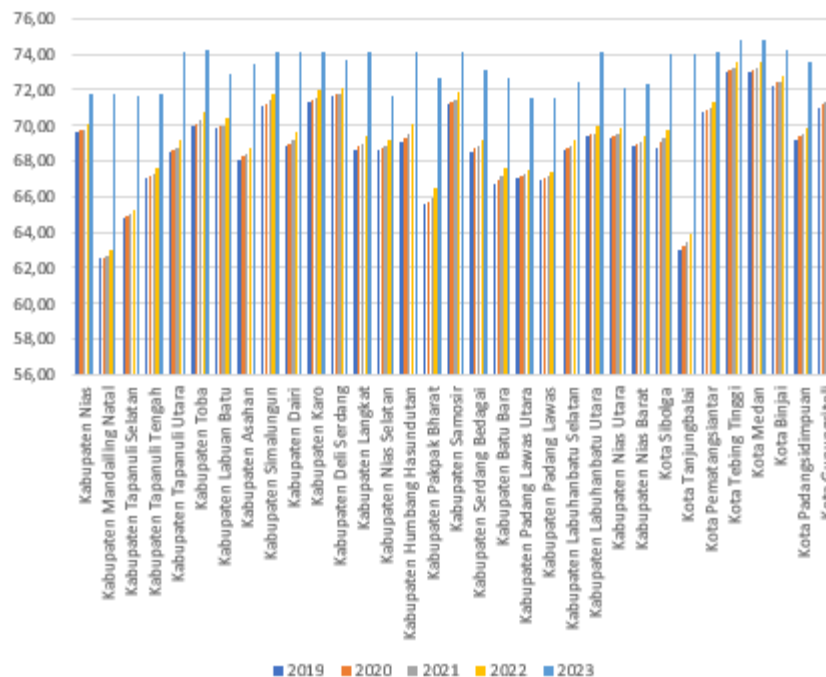
Gambar 1. 3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Tahun)

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dijelaskan, data yang disajikan menggambarkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023, yang memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan penduduk di berbagai kabupaten dan kota di provinsi ini. RLS mencerminkan durasi rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk untuk mengikuti pendidikan formal, yang menjadi indikator penting dalam mengevaluasi tingkat pendidikan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah. Secara keseluruhan, terlihat adanya peningkatan RLS di hampir semua kabupaten dan kota, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan selama periode tersebut. Kabupaten-kabupaten seperti Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Utara tercatat memiliki RLS yang tinggi, mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor pendidikan. Sementara itu, beberapa kabupaten dengan RLS rendah, seperti Kabupaten Nias dan Kabupaten Mandailing Natal, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Peningkatan RLS ini

dapat diartikan sebagai usaha yang berhasil dalam meningkatkan tingkat pendidikan di provinsi ini, meskipun masih terdapat disparitas yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan pendidikan yang lebih baik.

Kesehatan juga merupakan faktor krusial yang mempengaruhi rasio gini. Angka Harapan Hidup, sebagai indikator kesehatan, mencerminkan kualitas hidup dan akses terhadap layanan kesehatan. Kegunaan Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Namun, penelitian yang mengkaji dampak Angka Harapan Hidup terhadap rasio gini di Sumatera Utara masih terbatas, terutama dalam konteks perbedaan antar daerah.

Kesehatan salah satu modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat. Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat akan mempengaruhi beberapa sektor kehidupan. Di antaranya dapat meningkatkan produktivitas kerja masyarakat, meningkatkan pendapatan per kapita dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi dengan kesehatan mempunyai keterkaitan yang erat. Hubungan antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Kesehatan mempengaruhi ekonomi begitu pula dengan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan (Hasan et al., 2022).



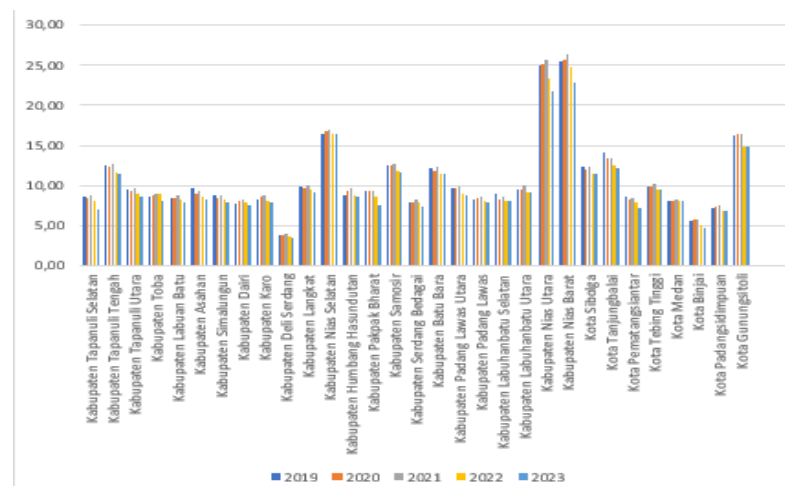
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Gambar 1. 4 Angka Harapan Hidup (AHH) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Tahun)

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dijelaskan, di Sumatera Utara, meskipun terdapat peningkatan dalam layanan kesehatan, masih ada disparitas yang signifikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan di berbagai daerah. Masyarakat yang memiliki Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik dan lebih mampu berkontribusi pada perekonomian. Data yang disajikan menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023, yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh penduduk di masing-masing kabupaten/kota. Terlihat adanya peningkatan Angka Harapan Hidup di hampir seluruh kabupaten dan kota sepanjang periode tersebut. Kabupaten dengan AHH tertinggi pada tahun 2023 adalah Kota Medan, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Nias. Peningkatan AHH ini menandakan adanya perbaikan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas hidup penduduk, meskipun masih ada variasi antar kabupaten/kota yang menunjukkan ketimpangan dalam perkembangan kesejahteraan di Sumatera Utara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis

bagaimana Angka Harapan Hidup berpengaruh terhadap rasio gini, terutama dalam konteks ketimpangan yang ada di provinsi ini.

Beberapa faktor di atas Jumlah Penduduk Miskin (JPM) juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam analisis ini. Hubungan antara kemiskinan dan rasio gini merupakan isu yang kompleks dan masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan ekonom. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio gini, yang berarti bahwa peningkatan kemiskinan akan memperburuk rasio gini (Fachruurrozi & Hasmarini, 2023). Namun berdasarkan buku Abihijit V. Bnerjee & Esther Duflo, 2011 *"A Radical Rethinking Of the Way to Fight Global Proverty"* berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh distribusi pendapatan (ketimpangan), tetapi lebih oleh bagaimana orang miskin membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya mereka (Abihijit, 2011). Namun, penelitian ini ingin mendalami lebih lanjut apakah hubungan antara kemiskinan dan rasio gini di Sumatera Utara mengikuti pola nasional atau memiliki karakteristik unik berdasarkan kondisi ekonomi lokal. Di Sumatera Utara, meskipun ada berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin masih cukup tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Gambar 1. 5 Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Jiwa)

Berdasarkan gambar 1.5 di atas, menunjukkan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) yang bersekolah di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023. Selama periode tersebut, terdapat fluktuasi dalam persentase penduduk miskin di berbagai kabupaten dan kota. Pada tahun 2019, Kabupaten Nias mencatatkan persentase tertinggi sebesar 15,94%, sementara Kota Medan memiliki persentase terendah sebesar 3,89%. Secara umum, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, persentase JPM mengalami sedikit peningkatan di sebagian besar daerah, dengan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Nias dan Kabupaten Mandailing Natal tetap menunjukkan angka yang signifikan. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terdapat penurunan yang terlihat di beberapa kabupaten, menunjukkan adanya upaya yang mungkin berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Meskipun demikian, beberapa daerah masih menunjukkan angka yang tinggi, menandakan tantangan yang terus ada dalam upaya pengentasan kemiskinan di provinsi ini. Data ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akses pendidikan bagi penduduk miskin di Sumatera Utara.

Penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi rasio gini. Misalnya, jika ditemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap Rasio Gini, maka kebijakan peningkatan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal, dapat menjadi prioritas (Aini & Nugroho, 2023). Jika kesehatan terbukti memiliki dampak yang signifikan, maka perlu ada peningkatan layanan kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah. Di Sumatera Utara, meskipun terdapat peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, masih ada disparitas yang signifikan dalam akses di berbagai daerah. Masyarakat yang memiliki Angka Harapan Hidup lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik dan lebih mampu berkontribusi pada perekonomian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor ini berpengaruh terhadap Rasio Gini, terutama dalam konteks ketimpangan yang masih ada di provinsi ini (Isroviyah, 2020).

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rasio gini. Dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Rasio Gini di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio gini, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara, serta memberikan inspirasi bagi penelitian lebih lanjut di bidang ekonomi dan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas apabila ditelaah kembali, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap rasio gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2010-2023?
2. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap rasio gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2010-2023?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Miskin (JPM) terhadap rasio gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2010-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap rasio gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2010-2023.
2. Menganalisis pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap rasio gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2010-2023.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin (JPM) terhadap rasio gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

- a. Mengidentifikasi pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi Jumlah Penduduk Miskin.
- b. Menghasilkan rekomendasi strategis untuk intervensi yang dapat mengurangi rasio gini melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

2. Manfaat Kebijakan

- a. Memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan di Provinsi Sumatera Utara untuk merancang program yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial.
- b. Membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan prioritas alokasi anggaran daerah yang lebih strategis pada sektor pendidikan dan kesehatan berdasarkan bukti empiris mengenai dampak terhadap penurunan rasio gini.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak ada plagiarisme antar penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut yaitu:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Sampel	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Analisis
1	Fitriyani, Chaeruniza, Rusiti, Qori'atul Septiavin, dan Euis Ratna Sari (2024)	Indonesia (2018-2021)	Variabel bebas: JPM, PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Variabel terikat: Rasio Gini Alat analisis: Regresi Data Panel	Hasil menunjukkan bahwa JPM dan Angka partisipasi kasar perguruan tinggi memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Sedangkan PDRB dan Rata-Rata Lama Sekolah memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini.
2	Ashari, Nesha Rizky, Syahrul Gunawan Irwan W, dan Nilawati (2024)	Indonesia (2019-2023)	Variabel bebas: Rata-Rata Lama Sekolah, TPT, Persentase Penduduk Miskin Variabel terikat: Rasio Gini Alat analisis: Regresi Data Panel	Hasil menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan Rasio Gini. Persentase penduduk miskin memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Sedangkan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini.
3	Vionita, Yozi dan Dwirani Puspa Artha (2024)	Pulau Jawa (2014-2023)	Variabel bebas: Rata-Rata Lama Sekolah, TPT, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Dan IPM Variabel terikat: Rasio Gini Alat analisis: Regresi Data Panel	Hasil menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. TPT dan Laju pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan berpengaruh

No	Peneliti	Sampel	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Analisis
				signifikan terhadap Rasio Gini. Sedangkan IPM memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini.
4	Saputra, Muhammad Irfan dan T. Zulham (2023)	Kota Banda Aceh (2003-2022)	Variabel bebas: Rata-Rata Lama Sekolah, Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Upah Minimum Variabel terikat: Rasio Gini Alat analisis: Regresi Linear Berganda	Hasil menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah dan Upah minimum memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Pengaruh jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Sedangkan Inflasi memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini.
5	Aliyah, Atsna Himmatul, dan Farida Rahmawati (2024)	Daerah Istimewa Yogyakarta (2016-2022)	Variabel bebas: Rata-Rata Lama Sekolah, AHH, TPAK, PDRB per Kapita Variabel terikat: Rasio Gini Alat analisis: Regresi Data Panel	Hasil menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. AHH dan TPAK memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Sedangkan PDRB per Kapita memiliki hubungan

No	Peneliti	Sampel	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Analisis
				positif dan tidak berpengaruh signifikan Rasio Gini.
6	Ersad, Muhammad, Amri Amir, dan Zulgani (2022)	Sumatera Bagian Selatan (2010-2019)	Variabel bebas: TPT, IPM, Kemiskinan Variabel terikat: Rasio Gini Alat analisis: Regresi Data Panel	Hasil menunjukkan bahwa TPT memiliki bubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Sedangkan IPM dan Kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Rasio Gini.
7	Dai S, Sri Indriyani, Syarwani Canon, dan Devi Oktaviani Bauty (2023)	Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur (17 Provinsi) (2010-2020)	Variabel bebas: Rata-Rata Lama, Pengeluaran per Kapita, UHH, Tingkat Kemiskinan Variabel terikat: Rasio Gini Alat analisis: Regresi Linear Berganda	Hasil menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Pengeluaran per Kapita dan UHH memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Sedangkan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan waktu serta variabel independen yang memiliki proksi yang berbeda. Penelitian sebelumnya terletak pada spesifikasi variabel independen yang digunakan sebagai proksi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi rasio gini. Jika penelitian-penelitian terdahulu menggunakan beragam indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pengeluaran per Kapita, dan variabel kemiskinan dengan definisi yang beragam, penelitian ini secara spesifik memilih Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai proksi kualitas sumber daya manusia dan tingkat

pendidikan, Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai representasi kualitas kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta Jumlah Penduduk Miskin (JPM) sebagai ukuran langsung dari tingkat kemiskinan absolut dalam suatu wilayah. Kombinasi ketiga variabel ini, yaitu RLS, AHH, dan JPM, menjadi pembeda utama dalam pendekatan penelitian ini dibandingkan studi-studi sebelumnya yang mungkin menggunakan kombinasi variabel yang berbeda untuk merepresentasikan dimensi pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Selain perbedaan pada proksi variabel independen, penelitian ini juga memiliki kekhasan pada konteks geografis yang difokuskan pada 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dan periode waktu yang diamati, yaitu tahun 2010 hingga 2023. Dengan demikian, perbedaan proksi ini tidak hanya terletak pada jenis variabel yang dipilih, tetapi juga pada bagaimana variabel-variabel tersebut diyakini relevan dan spesifik untuk menjelaskan rasio gini dalam konteks ruang dan waktu penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Rasio Gini

Ketidakberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa masalah pokok yang tidak terselesaikan seperti pengurangan Jumlah Penduduk Miskin, ketimpangan pendapatan antara yang miskin dan kaya serta ketimpangan antar negara berkembang dan negara maju. Masalah ketimpangan pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem dalam kelembagaan (Julihanza & Khoirudin, 2023).

Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang kompleks dan krusial dengan ekonomi pembangunan. Tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penurunan permintaan agregat, investasi yang terbatas, dan terhambatnya pengembangan sumber daya manusia akibat akses yang tidak merata. Selain itu, ketimpangan memperparah kemiskinan, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya.

Menurut Amartya Sen (1997) mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai salah satu dimensi dari ketidaksetaraan ekonomi yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada perbedaan dalam jumlah uang yang diterima, tetapi juga mencakup ketidaksetaraan dalam kemampuan, kesempatan, dan hasil (*outcomes*) lainnya. Sen menekankan bahwa fokus semata-mata pada pendapatan tidak cukup untuk memahami keseluruhan gambaran ketidaksetaraan dalam masyarakat. (Sen, 1997). Terdapat beberapa jenis ketimpangan ekonomi yang bisa disebutkan yaitu antara lain:

1. Ketimpangan Pendapatan

Ketidaksetaraan pendapatan adalah sejauh mana pendapatan didistribusikan secara tidak merata dalam sekelompok orang. Pendapatan bukan hanya uang yang diterima melalui pembayaran, tetapi semua uang yang diterima dari

pekerjaan (upah, gaji, bonus, dll.), investasi, seperti bunga pada rekening tabungan dan dividen dari saham, tabungan, tunjangan negara, pensiun (negara), pribadi, perusahaan) dan sewa. Pengukuran pendapatan dapat dilakukan secara individu atau rumah tangga - pendapatan semua orang yang berbagi rumah tangga tertentu. Pendapatan rumah tangga sebelum pajak yang mencakup uang yang diterima dari sistem jaminan sosial dikenal sebagai pendapatan kotor. Pendapatan rumah tangga termasuk semua pajak dan tunjangan dikenal sebagai pendapatan bersih.

2. Ketimpangan Bayaran/Upah

Bayaran/upah seseorang berbeda dengan penghasilan mereka. Bayaran mengacu pada pembayaran dari pekerjaan saja. Ini dapat dilakukan setiap *stick*, bulanan atau tahunan, biasanya dibayar mingguan atau bulanan dan mungkin juga termasuk *reward*. Oleh karena itu, ketimpangan pembayaran menjelaskan perbedaan antara upah orang dan ini mungkin berada dalam satu perusahaan.

3. Ketimpangan Kelayakan

Kekayaan mengacu pada jumlah *add up to aset* individu atau rumah tangga. Ini mungkin termasuk aset keuangan, seperti obligasi dan saham, properti dan hak pensiun swasta. Karena itu, ketimpangan kekayaan mengacu pada distribusi aset yang tidak merata dalam sekelompok orang.

Menurut Teori Kuznetz, ketimpangan pendapatan bisa diamati dari bagaimana percepatan pembangunan suatu negara, adanya kediktatoran, pemerintahan yang gagal di suatu negara, serta heterogenitas etnis. Ketimpangan pendapatan umumnya mungkin terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini biasanya distribusi pendapatan akan memburuk, namun sejalan dengan waktu di tahap selanjutnya, pendapatan mengalami peningkatan dan kesenjangan akan terkikis, sehingga nantinya akan menciptakan masyarakat yang lebih setara (Hajiji, 2010). Pola distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, mengakibatkan semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi sebab orang kaya akan mempunyai persentase tabungan yang lebih banyak dari pada orang miskin sehingga mendorong meningkatnya *aggregate saving rate* yang

dibarengi dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi (Todaro & Smith, 2013).

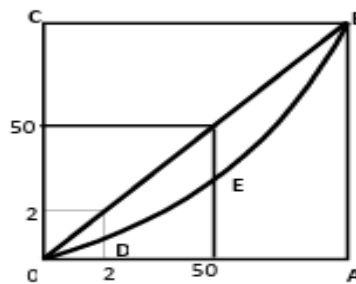
Teori distribusi pendapatan melibatkan dua perspektif utama, yaitu perspektif normatif dan perspektif positif. Perspektif normatif menggambarkan bagaimana seharusnya pendapatan atau kekayaan didistribusikan dalam masyarakat, sementara perspektif positif menjelaskan bagaimana sebenarnya pendapatan atau kekayaan didistribusikan dalam masyarakat (Titu et, all 2023) Ada beberapa teori yang dikembangkan untuk menjelaskan distribusi pendapatan, di antaranya adalah:

1. Teori Klasik; mengemukakan bahwa pembagian pendapatan bergantung pada kontribusi faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Menurut teori ini, faktor-faktor produksi akan menerima balas jasa sesuai dengan kontribusi dalam proses produksi.
2. Teori Marxis: mengemukakan bahwa distribusi pendapatan ditentukan oleh faktor produksi, yaitu buruh dan modal. Menurut teori ini, buruh cenderung mendapatkan upah yang rendah karena keuntungan modal lebih besar dibandingkan dengan upah buruh.
3. Teori Neo-Klasik: mengemukakan bahwa distribusi pendapatan ditentukan oleh permintaan dan penawaran faktor produksi. Menurut teori ini, faktor produksi akan menerima balas jasa sesuai dengan tingkat produktivitasnya.

Kurva Lorenz didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumah tangga/penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh rumah tangga/ penduduk daerah tersebut, apabila unit pendapatan ditata menurut urutan menaik. Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi atau kelompok terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20% dari jumlah total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020)

Pada titik 60 terdapat 60% kelompok bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung meliputi 100% atau seluruh populasi atau jumlah penduduk. Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima

oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100%, sehingga kedua sumbu (vertikal dan horizontal) sama panjangnya. Garis diagonal merupakan garis “pemerataan sempurna” (*perfect equality*) dalam distribusi ukuran pendapatan. Persentase pendapatan yang ditunjukkan oleh titik-titik di sepanjang garis diagonal tersebut persis sama dengan persentase penduduk penerima terhadap total penduduk.



Sumber: Irawan & M. Suparmoko, 1992

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

Dimana:

OC = Persentase kumulatif pendapatan

OA = Persentase kumulatif penduduk

OB = Diagonal Gini

D = menunjukkan bahwa 20% penduduk menikmati sekitar 8% pendapatan
Idealnya adalah 20%, demikian pula E identik dengan makin jauh garis OEB dari diagonal OB makin senjang tingkat pendapatan.

Ada berbagai cara untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Pilihan ukuran tidak mengubah seperti apa bentuk ketimpangan secara dramatis, namun perubahan ketimpangan dari waktu ke waktu di masing-masing negara dapat terlihat berbeda jika digunakan langkah yang berbeda. Ukuran ketimpangan ekonomi yang umum digunakan:

1. Rasio Gini

Salah satu indikator yang umum dipakai untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini. Nilai rasio gini berkisar dari nol hingga satu. Jika rasio gini sama dengan nol, itu berarti distribusi pendapatan sangat seimbang karena setiap kelompok penduduk mendapatkan bagian pendapatan yang setara. Akan tetapi, jika rasio ini sama dengan satu, itu menandakan adanya kesenjangan distribusi pendapatan yang sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu individu tunggal. Secara ringkas, semakin

tinggi nilai rasio gini, maka semakin tidak merata distribusi pendapatan di suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio gini menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dalam praktiknya, nilai Rasio Gini antara 0,50 hingga 0,70 diklasifikasikan sebagai ketimpangan yang tajam, sementara nilai Rasio Gini antara 0,20 hingga 0,35 menunjukkan ketimpangan yang relatif baik (merata). Rumus untuk menghitung Rasio Gini adalah sebagai berikut (Rini et al., 2022):

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Dimana:

G = Rasio Gini

P_i = Persentase rumah tangga/ penduduk pada kelompok pendapatan ke-(i)

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i)

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i-1)

K = Banyaknya kelompok pendapatan

Kelebihan Rasio Gini sebagai ukuran ketidakmerataan (BPS, 2020):

- a. Rasio Gini menunjukkan ukuran ketidaksetaraan melalui sebuah alat analisis rasio, daripada variabel tidak representatif dari sebagian besar masyarakat, seperti pendapatan per kapita atau produk domestik bruto.
- b. Dapat digunakan untuk membandingkan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor maupun negara, misalnya Rasio Gini untuk daerah perkotaan yang berbeda dari daerah pedesaan di banyak negara (walaupun di negara Amerika Serikat nilai Rasio Gini di wilayah perkotaan dan pedesaan hampir sama).
- c. Rasio Gini dapat membandingkan lintas daerah atau lintas negara dan mudah diinterpretasikan. PDB statistik sering dikritik karena tidak mewakili perubahan bagi seluruh penduduk. Rasio Gini akan menunjukkan seberapa besar pendapatan per kapita ternyata mengalami ketimpangan. Jadi, meskipun pendapatan per kapita naik, namun apabila Rasio Gini masih tinggi artinya kemiskinan bisa jadi masih ada dalam masyarakat.

- d. Rasio Gini yang dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan telah berubah dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga sangat mungkin untuk melihat apakah ketidakmerataan meningkat atau menurun.

2. Ukuran Rasio

Ukuran rasio membandingkan berapa banyak orang di satu tingkat distribusi pendapatan dibandingkan dengan orang di tingkat lain. Misalnya, rasio 20:20 membandingkan seberapa kaya 20% orang teratas, dibandingkan dengan 20% terbawah.(Anang, 2020). Rasio yang umum digunakan antara lain:

- a. Rasio 50/10 – menggambarkan ketimpangan antara bagian tengah dan bagian bawah dari distribusi pendapatan
- b. Rasio 90/10 – menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan bagian bawah.
- c. Rasio 90/50 – menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan bagian tengah
- d. Rasio 90/90 – menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan atas

3. Palma Ratio

Palma ratio adalah rasio bagi hasil dari 10% teratas dengan 40% terbawah. Dalam masyarakat yang lebih setara, rasio gini akan menjadi satu atau lebih rendah, yang berarti bahwa 10% teratas tidak menerima bagian yang lebih besar dari pendapatan nasional dari 40% terbawah. Dalam masyarakat yang sangat tidak setara, rasionya mungkin sebesar tujuh (Nakakita et al., 2024).

4. Ukuran Ketimpangan Menurut Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam 3 sesuai dengan dasar pengelompokan 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk berikut (Cox et al., 2014):

- a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan sedang atau menengah.
- c. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah.

2.1.2 Teori Human Capital

Schultz (1961) menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas ekonomi di suatu negara. *Human capital* merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 1776 di bidang ekonomi klasik (Fitzsimon, 1999). *Human capital* dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktivitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan *human capital*. Pendidikan dan pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga produktivitas juga akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi mementingkan kuantitas jumlah tenaga kerja (Rasyidi et al., 2020).

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan Pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak *output*, dan ada “perkembangan” atau “pembangunan” ekonomi kalau tidak hanya terdapat lebih banyak *output*, tetapi juga perubahan-

perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan *output* yang lebih banyak itu (Mankiw, 2001, 49-90).

Menurut Sukirno (2019), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam Masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang diartikan juga sebagai kenaikan jangka panjang kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan ketersediaan barang-barang ekonomi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh mengikuti kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan sesuatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dilaksanakan agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan cara memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah (Purba et al, 2021).

Hubungan antar pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dalam proses produksi, pemilik faktor produksi akan menerima kompensasi atas faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan berlangsung dalam siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Tetapi di sisi lain, menjadi pemasok faktor modular, tenaga kerja, sumber daya alam atau faktor jasa sehingga, akan menerima sebagian dari pendapatan pada waktu tertentu dan membayar harganya pada waktu lain. Teori Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan lurus dengan pertumbuhan ekonomi, pada saat produktivitas tenaga kerja meningkat akan mempengaruhi yield, meningkatnya yield terindikasi bahwa pekerja wilayah sekitar produktif dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hingga menurunkan tingkat kemiskinan (Caesarisma & Hamrullah, 2023).

2.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pendidikan merupakan modal utama bagi negara berkembang untuk menghadapi persaingan global. Menurut Mankiw, pendidikan mempunyai hubungan positif dengan pendapatan. Seseorang yang mempunyai jenjang

pendidikan tinggi, umumnya mempunyai kualitas, produktivitas, dan pendapatan yang tinggi. Menurut Nurske, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki hubungan positif. Apabila kualitas sumber daya rendah, produktivitasnya juga akan rendah dan semakin rendah pula pendapatannya (Suryadinata et al., 2023)

Pendidikan menjadi elemen penting dalam modal manusia dan dipandang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Todaro dan Smith mengemukakan mengenai pendidikan sebagai tujuan pembangunan yang mendasar, dimana pendidikan berperan sangat penting dalam bentuk keahlian suatu negara sebagai Upaya penyerapan teknologi modern dan sebagai pengembangan kapasitas demi terwujudnya pertumbuhan serta pengembangan berkelanjutan. (Putri, 2024).

Rumus Rata-Rata Lama Sekolah dapat dilakukan dengan:

$$RLS = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Dimana:

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

Xi = Lama sekolah penduduk ke-i umur 25 tahun

N = Jumlah penduduk umur 25 tahun ke atas

Lama pendidikan yang dijalani oleh individu dalam masyarakat sering kali diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah. Penilaian ini mencerminkan durasi pendidikan yang telah diselesaikan oleh seseorang. Rata-Rata Lama Sekolah (*cruel a long time of tutoring*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SLTP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. (BPS, 2018).

2.1.5 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Rasio Gini

Menurut De Gregorio dan Lee (2002), ditemukan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah yang lebih tinggi secara signifikan berkorelasi negatif dengan rasio gini. Artinya negara-negara dengan tingkat pendidikan rata-rata yang lebih cenderung

memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata. Selain itu, penelitian ini distribusi pendidikan yang merata, di mana ketidakmerataan dalam distribusi pendidikan justru memperburuk ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pemerataan akses pendidikan menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan (Gregorio, 2002).

Dengan adanya hubungan antara pendidikan dan kesenjangan pendapatan, dapat dilihat bahwa pendidikan itu semakin lama semakin penting, karena pendidikan tinggi cenderung lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini berkontribusi pada pengurangan rasio gini karena mereka mampu meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Oleh karena itu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan di masyarakat dapat membantu mengurangi rasio gini. Dengan pendidikan yang lebih baik, individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai pendapatan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan rasio gini di masyarakat (Alawiyah & Hasanah, 2024).

2.1.6 Angka Harapan Hidup (AHH)

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Beberapa ekonom menganggap bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi baik jika dinilai dari stok maupun sebagai investasi. Sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa atau sebagai suatu sasaran dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu, kesehatan dianggap sebagai model dan memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu maupun untuk masyarakat.

Menurut Idris (2016), perbaikan gizi dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sehingga perbaikan gizi dan peningkatan dibidang kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah. Tetapi, penyediaan fasilitas kesehatan terbatas pada dana pemerintah. Oleh sebab itu,

diperlukan pengalokasian dana dari masyarakat umum terutama partisipasi pengusaha, serta dengan memperbaiki sistem pengupahan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat, termasuk kebutuhan gizi minimum. Rendahnya tingkat gizi dan kesehatan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat penghasilan yang tercermin dalam tingkat pengeluaran keluarga yang rendah dan tingkat upah yang rendah. Pengalaman menunjukkan bahwa perbaikan tingkat hidup ternyata menghasilkan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Perbaikan kualitas ini akan menunjang pada peningkatan produktivitas yang akan meningkatkan pendapatan dan tingkat kehidupan masyarakat. (Puspasari, 2020).

Pengukur indikator kesehatan dilakukan menggunakan nilai Angka Harapan Hidup (AHH). Nilai AHH merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (Mantra, 2000). Semakin tinggi Angka Harapan Hidup (AHH) seseorang maka semakin berkualitas indikator kesehatannya (Rasyidi et al., 2020).

Angka Harapan Hidup adalah perhitungan seseorang dapat bertahan hidup berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, kesehatan, dan faktor lain yang memengaruhi. Angka Harapan Hidup bervariasi seiring berjalannya waktu pada setiap negara. Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam sistem perawatan kesehatan, gaya hidup, dan faktor-faktor lainnya. Penting untuk dicatat bahwa Angka Harapan Hidup adalah perkiraan statistik dan tidak menentukan berapa lama seseorang akan hidup secara individu. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi harapan hidup seseorang, termasuk faktor genetik, gaya hidup sehat, lingkungan, dan akses ke perawatan kesehatan yang baik. Perubahan Angka Harapan Hidup rata-rata saat lahir (AHH) di suatu wilayah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Perubahan Angka Harapan Hidup merupakan indikator dari upaya pemerintah untuk memaksimalkan dukungan terhadap kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan tingkat kesehatan di suatu wilayah. Perkembangan positif dalam Angka Harapan Hidup mencerminkan tujuan kebijakan kesehatan (Kunci, 2024)

2.1.7 Hubungan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rasio Gini

Ekonomi dan kesehatan memiliki suatu keterkaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat, dan perbaikan pada kondisi kesehatan masyarakat akan mempengaruhi produktivitas kerja. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan negara. Pemerintah harus mampu memberikan perlakuan yang sama kepada warganya dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan antara lain, tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang memadai, dan mutu makanan yang di konsumsi. Penanganan faktor tersebut harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang berkaitan. Keadaan faktor sosial ekonomi juga berpengaruh dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, seperti pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga (Lesmana et al., 2022).

Menurut (Sen, 1999) teori kapabilitasnya memberikan kerangka yang kuat untuk memahami peningkatan Angka Harapan Hidup (yang mencerminkan kesehatan yang lebih baik) berkontribusi pada pengurangan ketimpangan. Melalui pendekatan kapabilitas, menekankan bahwa pembangunan sejati harus berpusat pada peningkatan kemampuan (kapabilitas) individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai. Kesehatan, yang tercermin dalam Angka Harapan Hidup yang tinggi, merupakan kapabilitas fundamental. Individu yang sehat memiliki kapabilitas yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pasar kerja, dan kegiatan sosial, serta memiliki mobilitas yang lebih baik. Rasio gini sering kali berakar pada ketimpangan dalam kapabilitas. Ketika sebagian masyarakat terbebani oleh kesehatan yang buruk, kapabilitas mereka terbatas, mengurangi peluang ekonomi dan memperdalam jurang pemisah dengan kelompok yang lebih mampu. Oleh karena itu, peningkatan Angka Harapan Hidup secara merata meningkatkan kapabilitas di seluruh masyarakat, mengurangi hambatan yang dihadapi kelompok kurang mampu, dan berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih adil. Dalam pandangan Sen, kesehatan bukanlah sekadar variabel ekonomi, melainkan pilar penting dari kebebasan dan kesetaraan manusia.

Beberapa hubungan antara kesehatan dan ekonomi (Sihombing et al., 2022):

1. Kesehatan yang buruk dan baik akan mempengaruhi ekonomi

Salah satu masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat di Indonesia adalah kesehatan yang buruk. Kesehatan yang buruk membuat masyarakat sangat berisiko terserang berbagai penyakit berbahaya. Jika sudah sakit maka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengobati penyakitnya. Kondisi tersebut akan mengakibatkan penurunan kemampuan untuk menikmati hidup, tidak bisa bekerja dan menurunnya penghasilan. Sebaliknya jika kesehatan masyarakat baik maka memungkinkan masyarakat untuk tetap produktif dan bekerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai antisipasi disarankan untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau asuransi kesehatan.

2. Kesehatan yang buruk akan mengancam orang lain

Kesehatan yang buruk tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga mengancam orang lain. Contohnya, apabila sedang sakit maka anggota keluarga lain akan membantu merawat sehingga tidak ada waktu untuk bekerja. Akibatnya penghasilan menjadi menurun dan kebutuhan hidup menjadi tidak terpenuhi.

3. Masyarakat sehat maka produktivitas meningkat

Menerapkan pola hidup sehat menjadi salah satu cara memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat menjadi lebih kuat dari serangan berbagai macam penyakit. Apabila kebiasaan tersebut diterapkan oleh semua orang, bukan tidak mungkin jika masyarakat akan terus sehat. Masyarakat sehat maka produktivitas akan meningkat sehingga pendapatan negara juga ikut meningkat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

2.1.8 Jumlah Penduduk Miskin (JPM)

Kemiskinan merupakan wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan, keterbatasan, dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tidak wajar, dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh

rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil sosial dan budaya.

Menurut Abihijit V. Bnerjee & Esther Duflo mengemukakan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh distribusi pendapatan (ketimpangan), tetapi lebih oleh bagaimana orang miskin membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya mereka. Pendekatan pengukuran kemiskinan pada umumnya sepakat terhadap keterbatasan dari pendekatan pengukuran yaitu perhitungan Jumlah Penduduk Miskin (JPM). Secara umum metode pengukuran kemiskinan dikaitkan dengan 3 pendekatan, yaitu berdasarkan (Kemiskinan, 2018):

1. Garis kemiskinan pendapatan (*income-based poverty line*)

Kemiskinan adalah individu, rumah tangga, masyarakat atau kelompok sosial yang memperoleh pendapatan standar minimal. Pendekatan ini mengandung beberapa kelemahan seperti menyamaratakan daya beli masyarakat untuk setiap wilayah, padahal tingkat harga barang dan jasa antar negara dan antar daerah terpencil dan tidak terpencil, pendapatan di sini mengandung konsep statis, di mana orang yang berpendapatan di bawah \$1 dikategorikan miskin, padahal orang tersebut bisa saja mengonsumsi lebih dari \$1 per hari melalui kredit atau pinjaman yang akan dilunasi dimasa yang akan datang, dan pendapatan biasanya cenderung dilaporkan lebih rendah dalam survei karena lupa dan sulit diamati (terutama usaha pertanian).

2. Garis kemiskinan konsumsi (*consumption-based poverty line*)

Kemiskinan yang dikaitkan kebutuhan hidup minimal yang layak (*based needs*) untuk seseorang/rumah tangga. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan *basic needs*, maka dapat dihitung garis kemiskinan konsumsi” dan selanjutnya dapat dihitung persentase penduduk miskin (*head count index*), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan konsumsi.

3. Karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin

- a. Pendekatan keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I, pendekatan BKKBN dalam pengukuran kemiskinan didasarkan pada kriteria keluarga yang dibuat dalam tahapan berupa keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga sejahtera tahap III, keluarga sejahtera tahap III plus.
- b. Pendekatan karakteristik rumah tangga miskin hasil susenas, pada pendekatan ini ada delapan variabel yang layak dan operasional untuk mengidentifikasi penduduk/ rumah tangga miskin berupa luas lantai per kapita (lebih kecil atau lebih besar dari $8m^2$), jenis lantai (tanah atau bukan tanah), ketersediaan air bersih (tidak terlindung atau terlindung), keberadaan jamban tidak ada atau ada, kepemilikan aset (tidak punya atau punya), variasi konsumsi lauk pauk (tidak bervariasi atau bervariasi), pembeli pakaian (minimal membeli satu stel pakaian atau tidak), kehadiran dalam kegiatan sosial (ya atau tidak). Variabel-variabel tersebut telah mencakup aspek sosial dan ekonomi penduduk/rumah tangga di antaranya aspek sandang, pangan, perumahan, kepemilikan aset, dan aktivitas sosial.

Faktor penyebab kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan. Masyarakat menjadi miskin oleh sebab adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya-sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak.

2.1.9 Hubungan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan Rasio Gini

Saat ini menurut informasi yang banyak diperdebatkan oleh orang tentang jumlah orang miskin di Indonesia berkisar antara kurang lebih 40% dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya dengan kenyataan ini penduduk Indonesia hampir separuhnya adalah berada pada posisi miskin.

Penyebab fakta-fakta ini adalah kesalahan kebijakan yang dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia. Terutama praktik ekonomi yang lebih banyak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu memberikan peluang bagi terjadinya

kapitalisasi aset/modal oleh orang-orang tertentu. Di sinilah mulai munculnya adanya ketimpangan ekonomi yang cukup mencolok di Indonesia.

Persoalan lain yang juga berkaitan dengan masalah kemiskinan adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini sangat berkaitan erat dengan pola pembagian pendapatan. Ada dua ukuran yang biasa dipakai untuk melihat pola pembagian pendapatan, yaitu Rasio Gini dan sumbangan pendapatan 40% penduduk berpenghasilan rendah terhadap GNP. Apabila kondisi sumbangan 40% penduduk termiskin terhadap GNP dikaitkan dengan Batasan yang diberikan oleh para ahli mengenai ukuran ketimpangan ekonomi yang terbagi atas:

1. *High inequality*, apabila 40% dari penduduk berpenghasilan rendah menerima kurang dari 12% dari seluruh pendapatan nasional.
2. *Moderate inequality*, apabila mereka itu menerima antara 12-17%, dan
3. *Low inequality*, apabila mereka menerima 17% atau lebih dari itu, dari pendapatan nasional secara keseluruhan.

Lebih lanjut lagi terlihat bahwa baik menurut perhitungan Rasio Gini maupun distribusi pendapatan, kesenjangan di daerah perkotaan lebih buruk dari pada di daerah pedesaan walaupun Jumlah Penduduk Miskin di daerah perkotaan lebih sedikit dari pada di daerah pedesaan. Untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu daerah akan mempunyai ketimpangan pendapatan yang berat bila Rasio Gini sebesar 0,50 atau lebih
2. Rasio Gini sebesar 1,40 – 0,49 menunjukkan bahwa daerah atau sektor tersebut berada dalam keadaan ketimpangan pendapatan yang moderat, dan,
3. Ketimpangan yang ringan terdapat pada daerah atau sektor yang memiliki Rasio Gini sebesar 0,30 atau kurang.

Menurut Martin (2001) kemiskinan tidak selalu menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat kemiskinan dalam periode observasi tidak secara statistik berkaitan dengan perubahan tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini. Hasil ini sejalan dengan beberapa perspektif teoretis. Salah satunya

adalah teori pertumbuhan yang tidak merata, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan tidak selalu beriringan dengan penurunan ketimpangan (Ravallion, 2004). Sejalan dengan pemikiran Francois Bourguignon (2016) pertumbuhan ekonomi dapat terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu atau sektor ekonomi tertentu, sehingga meskipun kemiskinan dapat berkurang karena sebagian masyarakat berhasil melampaui garis kemiskinan, distribusi pendapatan secara keseluruhan tetap timpang atau bahkan semakin timpang jika kelompok berpendapatan tinggi mengalami peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar. Selain itu, teori pasar tenaga kerja tersegmentasi juga dapat menjelaskan hasil ini, di mana kelompok miskin mungkin terperangkap dalam segmen pasar tenaga kerja dengan upah rendah dan mobilitas terbatas, sehingga upaya pengentasan kemiskinan yang berhasil tidak secara otomatis mengubah struktur ketimpangan yang ada dengan kelompok berpendapatan lebih tinggi (Bourguignon, 2016).

Kalau melihat pada batasan tersebut dan kondisi distribusi pendapatan di Indonesia, maka tampak bahwa kondisi kesenjangan di negara kita pada saat ini berada pada kondisi “kesenjangan ringan”. Lebih jauh tampak bahwa kesenjangan di Jawa lebih buruk dari pada di luar Jawa, demikian juga kesenjangan di daerah perkotaan lebih buruk dari pada kesenjangan di pedesaan. Di samping itu juga terlihat bahwa masih ada kesenjangan antar sektor, di mana persentase penduduk miskin di sektor pertanian jauh di atas sektor lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Fitriyani, Chaeruniza, Rusiti, Septiavin, dan Sari (2024) melakukan analisis Jumlah Penduduk Miskin (JPM), PDRB sektor pertanian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Persentase pekerja sektor, dan Angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia. Dengan menggunakan alat analisis regresi data panel. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin (JPM), PDRB, Angka partisipasi kasar perguruan tinggi memiliki hubungan positif signifikan terhadap rasio gini. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah memiliki hubungan negatif signifikan terhadap rasio gini .

Ashari, Gunawan, Irwan, dan Nilawati (2024) melakukan analisis pendidikan, pengangguran dan kemiskinan terhadap rasio gini di Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio gini yang berarti peningkatan kualitas pendidikan mampu mengurangi rasio gini. Sebaliknya kemiskinan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio gini, menandakan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan memperburuk rasio gini. Di sisi lain, pengangguran tidak memberikan dampak signifikan terhadap rasio gini.

Vionita, Yozi dan Artha (2024) melakukan analisis pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap rasio gini di Pulau Jawa. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi data panel. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio gini. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan pertumbuhan penduduk memiliki hubungan positif signifikan terhadap rasio gini. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap rasio gini.

Saputra, Irfan, dan Zulham (2024) melakukan analisis Rata-Rata Lama Sekolah, jumlah penduduk dan inflasi terhadap rasio gini di Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan metode pendekatan data kuantitatif, dengan teknik regresi linear berganda dengan menggunakan data *time series*. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah dan upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio gini Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap rasio gini. Berbeda dengan yang lainnya, inflasi tidak signifikan terhadap rasio gini.

Aliyah, Aliyah dan Rahmawati (2024) melakukan analisis pendidikan, kesehatan, tenaga kerja pendapatan per kapita terhadap rasio gini di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap rasio gini. Sementara kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH)

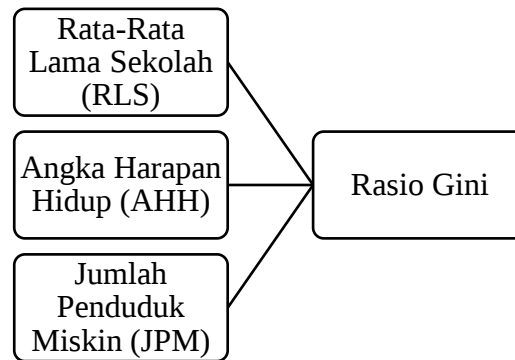
dan tenaga kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio gini. Kemudian, pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio gini.

Ersad, Amir, dan Zulgani (2022) melakukan analisis IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap rasio gini di Sumatera Bagian Selatan. Dengan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa IPM dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap rasio gini, sementara tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap rasio gini.

Dai, Indriyani, Canon, dan Devi (2023) melakukan analisis Rata-Rata Lama Sekolah, pengeluaran per kapita, UHH, dan tingkat kemiskinan terhadap rasio gini di KBI dan KTI. Dengan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio gini, artinya setiap peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dapat meningkatkan rasio gini di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio gini, artinya setiap peningkatan pengeluaran per kapita dapat menurunkan rasio gini di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Umur Harapan Hidup (UHH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio gini, artinya setiap peningkatan UHH dapat rasio gini. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio gini, artinya setiap peningkatan tingkat kemiskinan dapat menurunkan rasio gini di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, serta kajian yang menjelaskan hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap rasio gini, maka kerangka pemikiran konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Konseptual

Gambar 2.2 diatas menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rasio gini yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), Dan Jumlah Penduduk Miskin (JPM). Rata-Rata Lama Sekolah sebagai variabel independen (X1), Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai variabel independen (X2), dan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) sebagai variabel independen (X3) mempengaruhi rasio gini sebagai variabel dependen (Y).

Kerangka pemikiran ini mengasumsikan adanya hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Rasio Gini, yang didukung oleh Teori Modal Manusia. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi yang meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata suatu populasi, semakin besar proporsi individu yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan dengan upah yang lebih baik dan beragam. Pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas juga berperan penting dalam mengurangi disparitas keterampilan antar individu. Jurnal penelitian oleh De Gregorio dan Lee (2002) dalam *Review of Income and Wealth* menemukan bukti empiris lintas negara yang mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat Rata-Rata Lama Sekolah yang lebih tinggi secara signifikan memiliki tingkat rasio gini yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi dalam pendidikan yang luas dan merata dapat menjadi mekanisme efektif untuk mempersempit jurang pendapatan dalam Masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rasio Gini dalam kerangka ini diakui mempunyai bahwa hubungan yang lebih kompleks. Secara konseptual, peningkatan AHH dapat berkontribusi pada penurunan rasio gini. Penelitian oleh Subramanian dan Kawachi (2006) dalam *Epidemiologic Reviews* meninjau literatur yang menunjukkan adanya korelasi negatif antara rasio gini yang tinggi dengan indikator kesehatan yang buruk dan harapan hidup yang lebih rendah. Meskipun arah kausalitas bisa dua arah, peningkatan AHH secara umum mengindikasikan kondisi sosial yang lebih baik yang berpotensi mengurangi ketidaksetaraan secara keseluruhan, termasuk dalam hal pendapatan. Selain itu, kebijakan kesehatan yang merata dapat mengurangi disparitas kesehatan antar kelompok pendapatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasio gini. Teori pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Sen (1999) menekankan pentingnya kesehatan dan pendidikan sebagai dimensi penting dari kesejahteraan dan kebebasan individu, yang secara tidak langsung dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan. Beberapa studi juga menunjukkan adanya korelasi positif antara kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (e.g., Bloom, Canning, & Sevilla, 2004).

Kerangka pemikiran ini mengasumsikan adanya hubungan antara Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan Rasio Gini. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin secara langsung merefleksikan adanya sebagian besar masyarakat dengan tingkat pendapatan yang jauh di bawah rata-rata. Kondisi ini secara otomatis memperlebar jurang pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok yang lebih kaya, sehingga meningkatkan nilai Rasio Gini sebagai ukuran ketidaksetaraan pendapatan. Penelitian oleh Ravallion (2017) dalam *The World Bank Economic Review* membahas secara eksplisit hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan, dan menemukan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali berjalan beriringan dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Upaya penurunan Jumlah Penduduk Miskin melalui berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap sumber daya diharapkan dapat berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, yang selanjutnya dari hipotesis yang ada akan diuji kebenarannya dengan menggunakan data yang tersedia. Berikut merupakan hipotesis dalam penelitian ini:

1. Diduga Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap rasio gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023.
2. Diduga Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh terhadap rasio gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023.
3. Diduga Jumlah Penduduk Miskin (JPM) berpengaruh terhadap rasio gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2010-2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk mengeksplorasi pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang dianalisis dalam studi ini mencakup Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Jumlah Penduduk Miskin (JPM). Sedangkan variabel dependen yang menjadi perhatian utama adalah Rasio Gini, yang berfungsi sebagai ukuran ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi. Melalui analisis statistik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana RLS dan AHH dapat berkontribusi dalam mengurangi rasio gini, serta bagaimana JPM dapat berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber yang kredibel dan dianalisis untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi isu rasio gini di masyarakat.

3.2 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan data panel, yang melibatkan pengumpulan data secara berurutan dalam periode waktu tertentu untuk sejumlah individu atau kategori. Dalam penelitian ini, data yang digunakan mencakup *Time Series* dari tahun 2010 hingga 2023 serta *Cross Section* yang mencakup 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang dianalisis meliputi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Jumlah Penduduk Miskin (JPM). Selain itu, informasi tambahan juga diambil dari kajian literatur yang mencakup berbagai jurnal ilmiah dan buku-buku referensi.

3.3 Alat Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis regresi data panel merupakan metode analisis data kuantitatif yang digunakan. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut Gujarati (2003)

penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh antara lain:

1. Menggunakan data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak, hal tersebut dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. Sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar sehingga estimasi yang didapatkan lebih baik.
2. Dengan menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*).
3. Data panel mampu mengurangi adanya kolinearitas antar variabel
4. Menggunakan data panel lebih baik dalam mendeteksi serta mengukur efek yang secara sederhana tidak bisa dilakukan oleh data *time series* murni dan data *cross section* murni.
5. Data panel dapat mengurangi bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang diobservasi lebih banyak.
6. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.

Analisis data akan dilakukan dengan mengolah data melalui program *Econometric Views 12* (Eviews 12). Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots 3.3$$

Keterangan:

Y = Rasio gini (Poin)

α = Koefisien konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

X_2 = Variabel Angka Harapan Hidup (Tahun)

X_3 = Variabel Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

i = wilayah ke-i

t = tahun ke-t

ϵ_{it} = Variabel gangguan (error term)

3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

Pendekatan ini menggunakan pendekatan regresi data panel yang dapat diimplementasikan dengan menggunakan metode *Common Effect Model* atau *Pool*

Least Square (CEM), metode *Fixed Effect Model* (FEM), atau metode *Random Effect Model* (REM), seperti contoh berikut:

1. ***Common Effect Model (CEM)***

Common Effect Model menggabungkan data *time series* dan *cross section* menjadi satu kesatuan tanpa memperhitungkan perbedaan waktu atau individu, menjadikannya metode yang sangat sederhana untuk parameter model data panel. *Common Effect Model* ini metode yang mengabaikan perbedaan individu dan waktu, atau dengan kata lain, perilaku data antar orang adalah konstan dari waktu ke waktu.

2. ***Fixed Effect Model (FEM)***

Saat menggunakan *Fixed Effect Model* dalam mengestimasi data panel, variabel gangguan dapat memiliki hubungan satu sama lain baik melalui waktu maupun antar individu. Model FEM sebaiknya digunakan dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai strategi estimasi berdasarkan pada anjuran menurut program Eviews 12 itu sendiri. *Fixed Effect* adalah sesuatu yang besarnya tetap sama selama rentang waktu tertentu. Pendekatan ini membuat asumsi bahwa masing-masing variabel bervariasi (*cross-section*), dan variasi ini dapat dideteksi dalam intersepsi. Metode ini memiliki kelebihan yaitu dapat membedakan antara efek individual dan efek waktu, dan juga lebih fleksibel karena tidak perlu membuat asumsi bahwa komponen error tidak berhubungan dengan variabel independen.

3. ***Random Effect Model (REM)***

Sebuah metode yang disebut *Random Effect Model* dapat digunakan untuk mengestimasi data panel di mana variabel gangguan (residual) mungkin saling terkait antar waktu maupun antar entitas. Menurut metode ini bahwa *error-term* tetap ada dan bisa saja saling berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. Metode *Generalized Least Square* (GLS) digunakan sebagai strategi estimasi. Jika jumlah individu lebih banyak daripada periode waktunya, maka metode ini akan bekerja lebih baik pada data panel.

3.3.2 Uji Spesifikasi Model

Uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* dapat digunakan untuk memilih model atau metode estimasi untuk menguji persamaan regresi yang akan diestimasi.

1. Uji Chow/Likelihood Ratio

Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi pendekatan yang baik pada data panel. Dasar kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. *Common Effect Model* (CEM) paling tepat digunakan apabila nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section* $F > 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 diterima.
- b. *Fixed Effect Model* (FEM) akan paling tepat digunakan apabila nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section* $F < 0,05$ (nilai signifikan) maka H_1 ditolak

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM), H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan yang dilakukan pada hipotesis tersebut adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Hasil perbandingan tersebut yang nantinya digunakan apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitu pun sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka H_0 diterima dan model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model*.

2. Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam mengestimasi pendekatan yang baik pada data panel. Dasar kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. *Random Effect Model* (REM) paling tepat digunakan apabila nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section random* $> 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 diterima.

- b. *Fixed Effect Model* (FEM) akan paling tepat digunakan apabila nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section random* $< 0,05$ (nilai signifikan) maka H_1 ditolak.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Random Effect Model* (REM),

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika probabilitas *Chi-Square* yang diperoleh pada uji *hausman* lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-Square* yang diperoleh kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM) dalam mengestimasi pendekatan yang baik pada data panel. *Random Effect Model* dikembangkan oleh *Breusch-pagan* dengan kegunaannya untuk menguji signifikansi berdasarkan nilai residual metode OLS. Dasar kriteria sebagai berikut:

- a. *Common Effect Model* (CEM) paling tepat digunakan apabila nilai *cross section Breusch-pagan* $> 0,05$ (nilai signifikan)
- b. *Random Effect Model* (REM) paling tepat digunakan apabila nilai *cross section Breusch-pagan* $< 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 ditolak.

Random Effect Model (REM) paling tepat digunakan apabila nilai *cross section Breusch-pagan* $< 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 ditolak.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Common Effect Random* (CEM).

H_1 : *Random Effect Model* (REM)

Jika probabilitas *Chi-Square* yang diperoleh pada uji *langrange multiplier* lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-Square* yang diperoleh kurang

dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

3.3.3 Uji Statistik

1. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Gujarati dan Porter (2012) uji signifikansi merupakan prosuder yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis dari sampel. Uji t ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing. Dengan tingkat signifikansi 0,05, statistik Uji t dilakukan dengan melihat dan membandingkan nilai thitung masing-masing estimator dengan nilai t kritisnya dari tabel. Langkah-langkah dalam melakukan uji t yaitu:

a. Membuat hipotesis melalui uji satu sisi

Uji hipotesis variabel Rata-Rata Lama Sekolah

$H_0 : \beta_1 = 0$, (variabel Rata-Rata Lama Sekolah tidak berpengaruh terhadap variabel rasio gini)

$H_1 : \beta_1 < 0$, (variabel Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif terhadap variabel rasio gini)

Uji hipotesis variabel Angka Harapan Hidup

$H_0 : \beta_1 = 0$, (variabel Angka Harapan Hidup tidak berpengaruh terhadap variabel rasio gini)

$H_1 : \beta_1 < 0$, (variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif terhadap variabel rasio gini)

Uji Hipotesis variabel Jumlah Penduduk Miskin

$H_0 : \beta_1 = 0$, (variabel Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh terhadap variabel rasio gini)

$H_1 : \beta_1 < 0$, (variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif terhadap variabel rasio gini)

b. Menentukan nilai kritis t-tabel distribusi t (n - k). Dengan *level of significance* (α) = 5%

c. Kriteria dalam pengambilan keputusan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 dapat disimpulkan yaitu jika nilai t-tabel (t-hitung > t-tabel) maka H_0 ditolak

dan H_a diterima artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t -hitung lebih kecil dari t -tabel (t -hitung $>$ t -tabel) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Gujarati dan Porter, 2012). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan derajat kepercayaan sebesar 5%. Langkah-langkah dalam pengujian Uji F yaitu:

- a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)
 $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ (variabel Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Jumlah Penduduk Miskin secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel rasio gini)
 $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ (maka variabel Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Jumlah Penduduk Miskin secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel rasio gini)
- a. Menentukan nilai F tabel berdasarkan besarnya α dan df di mana besarnya ditentukan oleh numerator ($k-1$) dan denominator ($n-k$). Jika probabilitas F statistik $>$ 0.05 maka H_0 diterima, yang artinya variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Kriteria pengambilan keputusan untuk menolak H_0 atau menerima H_a dapat disimpulkan yaitu jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung $>$ F tabel), maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel rasio gini. Sebaliknya, Jika F hitung lebih kecil dari F tabel (F hitung $>$ F tabel) maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel Rata-Rata Lama Sekolah, Angka

Harapan Hidup, dan Jumlah Penduduk Miskin secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel rasio gini

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen, atau regresi dijelaskan oleh variabel penjelas atau regresi dimana nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1 (Gujarati dan Porter 2009:84). Pengujian ini pada intinya mengukur seberapa jauh variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang besar atau mendekati satu artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

3.3.4 Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi data panel, validitas model estimasi juga sangat bergantung pada pemenuhan asumsi-asumsi penting. Menurut Gujarati, uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS (Basuki & Prawoto, 2019). Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square*. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu. Menurut Ghazali (2018:159) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yaitu, uji Normalitas, uji Multikolinieritas dan uji Heteroskedastisitas. Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian Autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Sehingga dalam data panel cukup di uji Normalitas, uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas. Adapun beberapa pengujian relevan yang perlu dipertimbangkan dalam analisis regresi data panel adalah:

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak terdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi di bawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal (Gujarati & Porter, 2012).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi antar variabel independen (independen) dengan model regresi. Dalam menguji multikolinieritas, dapat dilihat dari apabila nilai yang di dapatkan dari masing-masing variabel berada di atas 0,80 maka dapat disimpulkan terjadinya multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2018). Uji Heteroskedastisitas ada dua bagian, yaitu:

- a. *Cross Section Heteroscedasticity* merupakan heteroskedastisitas yang dapat disebabkan oleh data perusahaan.
- b. *Period Heteroscedasticity* merupakan heteroskedastisitas yang dapat disebabkan oleh data tahun (waktu).

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Rasio Gini

Variabel ketimpangan pendapatan ditentukan oleh Rasio Gini. Rasio Gini merupakan indikator yang mengukur ketimpangan pendapatan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana 0 menunjukkan pemerataan sempurna (setiap individu memiliki pendapatan yang sama), 1 menunjukkan ketimpangan

sempurna satu individu memiliki seluruh pendapatan, sementara yang lain tidak memiliki apa-apa). Data diambil dari Rasio Gini pada 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023 dalam satuan poin.

2. Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang mengukur pendidikan. Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, Rata-Rata Lama Sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan Rata-Rata Lama Sekolah adalah penduduk usia 25 tahun. Data diambil dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023 dalam satuan tahun.

3. Variabel Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang mengukur kesehatan. Rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan dihitung dari hasil sensus serta survei kependudukan. Data diambil dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023 dalam satuan tahun.

4. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (JPM)

Jumlah Penduduk Miskin (JPM) merupakan indikator yang mengukur kemiskinan. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan ini biasanya dihitung berdasarkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Data diambil dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023 dalam satuan jiwa.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Bab ini akan membahas hasil analisis dari variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan Rasio Gini dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel, yaitu gabungan antara *time series* dan *cross section*. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 14 tahun secara beruntun dari tahun 2010 sampai tahun 2023 dengan mencakup wilayah 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan alat analisis atau *software* yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dengan aplikasi Eviews versi 12. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen.

4.1.1 Rasio Gini

Rasio Gini adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Rasio Gini lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah (Sabillah & Sabillah, 2023).

Rasio gini muncul pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada titik ini, distribusi pendapatan akan memburuk, tetapi tahap selanjutnya akan meningkatkan distribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ketimpangan pendapat dengan indikator rasio gini digunakan untuk mengetahui hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Koefisien Gini dihitung dengan akumulasi luas antara diagonal dan Kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total setengah persegi di mana kurva Lorenz berada (Caesarisma & Hamrullah, 2023).

Adapun, Rasio Gini yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Gini di 33 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara yang dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah.

Tabel 4. 1 Rasio Gini di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023 (Poin)

No	Wilayah	Tahun	Gini
1	Kab. Nias	2010	0,3165
		2011	0,2352
		2012	0,2276
		2013	0,2776
		2014	0,2624
		2015	0,2491
		2016	0,2735
		2017	0,2491
		2018	0,2645
		2019	0,274
		2020	0,2512
		2021	0,2452
		2022	0,275
		2023	0,279
2	Kabupaten Mandailing Natal	2010	0,2718
		2011	0,291
		2012	0,3186
		2013	0,2763
		2014	0,2791
		2015	0,2874
		2016	0,27
		2017	0,2523
		2018	0,2574
		2019	0,2623
		2020	0,2478
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	2010	0,2152
		2011	0,2599
		2012	0,2777
		2013	0,2523
		2014	0,2264
		2015	0,2349
		2016	0,2729
		2017	0,2528
		2018	0,2727
		2019	0,2467
		2020	0,2022
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	2010	0,3007
		2011	0,365
		2012	0,3291
		2013	0,3079
		2014	0,3027
		2015	0,3588
		2016	0,3062
5	Kabupaten Tapanuli Utara	2017	0,3058
		2018	0,3174
		2019	0,309
		2020	0,335
		2021	0,2917
		2022	0,233
		2023	0,241
		2010	0,2897
		2011	0,347
		2012	0,3542
		2013	0,3003
6	Kabupaten Toba	2014	0,3045
		2015	,3558
		2016	0,3087
		2017	0,3289
		2018	0,2819
		2019	0,3065
		2020	0,2867
		2021	0,2766
		2022	0,242
		2023	0,262
		2010	0,316
7	Kabupaten Labuan Batu	2011	0,3152
		2012	0,3395
		2013	0,3437
		2014	0,3017
		2015	0,328
		2016	0,3077
		2017	0,2922
		2018	0,3279
		2019	0,2753
		2020	0,2903
		2021	0,2719
		2022	0,305
		2023	0,295
		2010	0,2293
		2011	0,2998
		2012	0,3035
		2013	0,3275
		2014	0,2962
		2015	0,3062
		2016	0,3082
		2017	0,2792
		2018	0,2936
		2019	0,2767
		2020	0,2715
		2021	0,2564
		2022	0,278
		2023	0,244

No	Wilayah	Tahun	Gini
8	Kabupaten Asahan	2010	0,2495
		2011	0,31
		2012	0,3333
		2013	0,2634
		2014	0,2768
		2015	0,2742
		2016	0,2826
		2017	0,2668
		2018	0,2912
		2019	0,2793
		2020	0,2605
		2021	0,2441
		2022	0,255
		2023	0,26
9	Kabupaten Simalungun	2010	0,3137
		2011	0,2993
		2012	0,3212
		2013	0,3286
		2014	0,3557
		2015	0,3186
		2016	0,296
		2017	0,2554
		2018	0,2897
		2019	0,2738
		2020	0,295
		2021	0,2641
		2022	0,262
		2023	0,295
10	Kabupaten Dairi	2010	0,2536
		2011	0,2752
		2012	0,2889
		2013	0,2769
		2014	0,2745
		2015	0,2787
		2016	0,3006
		2017	0,2403
		2018	0,2649
		2019	0,2873
		2020	0,2706
		2021	0,2268
		2022	0,221
		2023	0,241
11	Kabupaten Karo	2010	0,2583
		2011	0,3035
		2012	0,2872
		2013	0,2865
		2014	0,271
		2015	0,3368
		2016	0,3283
		2017	0,2678
		2018	0,2682
		2019	0,2642
		2020	0,2706
		2021	0,2327
		2022	0,236
		2023	0,24
12	Kabupaten Deli Serdang	2010	0,2444
		2011	0,2722

No	Wilayah	Tahun	Gini
		2012	0,3014
		2013	0,2748
		2014	0,2724
		2015	0,3159
		2016	0,2823
		2017	0,2814
		2018	0,2935
		2019	0,2732
		2020	0,312
		2021	0,2628
		2022	0,27
		2023	0,295
13	Kabupaten Langkat	2010	0,2389
		2011	0,3062
		2012	0,3115
		2013	0,308
		2014	0,2787
		2015	0,2674
		2016	0,2834
		2017	0,2489
		2018	0,2534
		2019	0,266
		2020	0,2378
		2021	0,2381
		2022	0,26
		2023	0,257
14	Kabupaten Nias Selatan	2010	0,293
		2011	0,2406
		2012	0,2259
		2013	0,2069
		2014	0,2354
		2015	0,2411
		2016	0,2136
		2017	0,2694
		2018	0,3295
		2019	0,3186
		2020	0,2865
		2021	0,2411
		2022	0,223
		2023	0,261
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	2010	0,3014
		2011	0,2755
		2012	0,2762
		2013	0,2565
		2014	0,2226
		2015	0,2666
		2016	0,275
		2017	0,2982
		2018	0,2909
		2019	0,2893
		2020	0,2464
		2021	0,3043
		2022	0,258
		2023	0,256
16	Kabupaten Pakpak Bharat	2010	0,2974
		2011	0,2675
		2012	0,3016
		2013	0,3121

No	Wilayah	Tahun	Gini
		2014	0,2769
		2015	0,3031
		2016	0,2644
		2017	0,2555
		2018	0,2393
		2019	0,2791
		2020	0,2475
		2021	0,2421
		2022	0,274
		2023	0,251
17	Kabupaten Samosir	2010	0,3204
		2011	0,2744
		2012	0,3038
		2013	0,3306
		2014	0,3183
		2015	0,2875
		2016	0,2764
		2017	0,287
		2018	0,2846
		2019	0,301
		2020	0,3175
		2021	0,2735
		2022	0,298
		2023	0,251
18	Kabupaten Serdang Bedagai	2010	0,2453
		2011	0,265
		2012	0,2843
		2013	0,2537
		2014	0,2599
		2015	0,2906
		2016	0,2545
		2017	0,2754
		2018	0,2828
		2019	0,2571
		2020	0,262
		2021	0,2287
		2022	0,24
		2023	0,225
19	Kabupaten Batu Bara	2010	0,2184
		2011	0,2904
		2012	0,2461
		2013	0,2501
		2014	0,2109
		2015	0,283
		2016	0,2676
		2017	0,2335
		2018	0,2494
		2019	0,2773
		2020	0,2592
		2021	0,2396
		2022	0,243
		2023	0,255
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2010	0,2312
		2011	0,241
		2012	0,2797
		2013	0,2152
		2014	0,2336
		2015	0,2689

No	Wilayah	Tahun	Gini
		2016	0,2525
		2017	0,2498
		2018	0,2989
		2019	0,2702
		2020	0,2283
		2021	0,2547
		2022	0,245
		2023	0,241
21	Kabupaten Padang Lawas	2010	0,2527
		2011	0,2746
		2012	0,3074
		2013	0,2571
		2014	0,2534
		2015	0,2969
		2016	0,3256
		2017	0,2482
		2018	0,2985
		2019	0,2313
		2020	0,2653
		2021	0,2525
		2022	0,227
		2023	0,225
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2010	0,2547
		2011	0,2213
		2012	0,2296
		2013	0,2228
		2014	0,2274
		2015	0,2611
		2016	0,2435
		2017	0,2197
		2018	0,2427
		2019	0,2497
		2020	0,1935
		2021	0,2317
		2022	0,247
		2023	0,231
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2010	0,2438
		2011	0,2505
		2012	0,2531
		2013	0,2388
		2014	0,2379
		2015	0,3001
		2016	0,2549
		2017	0,2665
		2018	0,2819
		2019	0,2668
		2020	0,2624
		2021	0,2431
		2022	0,276
		2023	0,238
24	Kabupaten Nias Utara	2010	0,2858
		2011	0,2543
		2012	0,2996
		2013	0,2642
		2014	0,2523
		2015	0,2608
		2016	0,266
		2017	0,2685

No	Wilayah	Tahun	Gini
		2018	0,2374
		2019	0,2844
		2020	0,2506
		2021	0,2359
		2022	0,239
		2023	0,228
25	Kabupaten Nias Barat	2010	0,2918
		2011	0,3592
		2012	0,2471
		2013	0,2109
		2014	0,2199
		2015	0,2524
		2016	0,2899
		2017	0,2469
		2018	0,2833
		2019	0,2578
		2020	0,2339
		2021	0,2238
		2022	0,21
		2023	0,208
26	Kota Sibolga	2010	0,2972
		2011	0,3223
		2012	0,3366
		2013	0,3219
		2014	0,3106
		2015	0,3541
		2016	0,3442
		2017	0,3234
		2018	0,3032
		2019	0,2718
		2020	0,2912
		2021	0,2764
		2022	0,346
		2023	0,246
27	Kota Tanjungbalai	2010	0,2826
		2011	0,3317
		2012	0,3514
		2013	0,3348
		2014	0,29
		2015	0,3647
		2016	0,3726
		2017	0,2784
		2018	0,332
		2019	0,2678
		2020	0,2716
		2021	0,2477
		2022	0,245
		2023	0,238
28	Kota Pematangsiantar	2010	0,2551
		2011	0,3209
		2012	0,3189
		2013	0,3124
		2014	0,2938
		2015	0,3579
		2016	0,3213
		2017	0,3494
		2018	0,334
		2019	0,3298

No	Wilayah	Tahun	Gini
		2020	0,3362
		2021	0,3076
		2022	0,321
		2023	0,329
29	Kota Tebing Tinggi	2010	0,3154
		2011	0,324
		2012	0,2931
		2013	0,2864
		2014	0,3139
		2015	0,3982
		2016	0,3577
		2017	0,3035
		2018	0,3396
		2019	0,3237
		2020	0,3337
		2021	0,344
		2022	0,334
		2023	0,317
30	Kota Medan	2010	0,361
		2011	0,3269
		2012	0,394
		2013	0,3959
		2014	0,322
		2015	0,3739
		2016	0,3328
		2017	0,352
		2018	0,3144
		2019	0,3519
		2020	0,3199
		2021	0,402
		2022	0,399
		2023	0,373
31	Kota Binjai	2010	0,2598
		2011	0,3705
		2012	0,2693
		2013	0,2603
		2014	0,3084
		2015	0,2517
		2016	0,3155
		2017	0,3163
		2018	0,3085
		2019	0,3511
		2020	0,3244
		2021	0,2903
		2022	0,302
		2023	0,318
32	Kota Padangsidempuan	2010	0,3014
		2011	0,3339
		2012	0,3393
		2013	0,3179
		2014	0,319
		2015	0,3166
		2016	0,3335
		2017	0,3236
		2018	0,3593
		2019	0,3098
		2020	0,3538
		2021	0,3101

No	Wilayah	Tahun	Gini
33	Kota Gunungsitoli	2022	0,275
		2023	0,267
		2010	0,4268
		2011	0,3532
		2012	0,3445
		2013	0,3247
		2014	0,3477
		2015	0,3674

No	Wilayah	Tahun	Gini
		2016	0,3569
		2017	0,3463
		2018	0,3608
		2019	0,3183
		2020	0,3223
		2021	0,3166
		2022	0,303
		2023	0,308

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan Rasio Gini dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara dari tahun 2010 hingga 2023. Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimum. Kabupaten Binjai mengalami penurunan nilai Rasio Gini dari 0,361 di tahun 2010 menjadi 0,317 di tahun 2023, meskipun dalam tren jangka pendek terlihat adanya kenaikan dari tahun 2021 ke 2023. Sebaliknya, Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan penurunan yang lebih konsisten dan signifikan, dengan nilai Rasio Gini menurun dari 0,271 menjadi 0,219 pada periode yang sama, mengindikasikan penurunan ketidakmerataan pendapatan. Sementara itu, wilayah lain seperti Kota Medan menunjukkan fluktuasi tanpa tren kenaikan atau penurunan yang jelas. Perbedaan arah dan besaran perubahan nilai Rasio Gini antar wilayah ini menggaris bawahi kompleksitas faktor-faktor lokal yang memengaruhi distribusi pendapatan di Sumatera Utara, dan memerlukan analisis lebih mendalam untuk memahami penyebab perubahan tersebut di setiap kabupaten/kota. Data ini memberikan gambaran penting tentang dinamika rasio gini di wilayah tersebut, yang dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan ekonomi dan sosial.

4.1.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan bermanfaat untuk digunakan dunia kerja. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah dapat menggunakan indikator -rata-rata lama seseorang bersekolah. Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin

tinggi Rata-Rata Lama Sekolah di suatu wilayah, maka semakin tinggi juga jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk di wilayah tersebut. yang pernah dijalani. (Ludia Ni'matuzzahroh1, 2022). Adapun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4. 2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023 (Tahun)

No	Wilayah	Tahun	RLS	No	Wilayah	Tahun	RLS
1	Kabupaten Nias	2010	4,59			2012	7,45
		2011	4,63			2013	7,5
		2012	4,67			2014	7,55
		2013	4,71			2015	8,02
		2014	4,75			2016	8,03
		2015	4,76			2017	8,28
		2016	4,92			2018	8,29
		2017	4,93			2019	8,48
		2018	4,94			2020	8,62
		2019	5,15			2021	8,84
		2020	5,36			2022	8,86
		2021	5,64			2023	8,87
		2022	5,88	5	Kabupaten Tapanuli Utara	2010	8,54
		2023	6,14			2011	8,6
2	Kabupaten Mandailing Natal	2010	7,27			2012	8,79
		2011	7,39			2013	9,04
		2012	7,47			2014	9,05
		2013	7,52			2015	9,31
		2014	7,54			2016	9,32
		2015	7,63			2017	9,46
		2016	7,89			2018	9,65
		2017	8			2019	9,71
		2018	8,11			2020	9,85
		2019	8,36			2021	9,99
		2020	8,62			2022	10
		2021	8,63			2023	10,09
		2022	8,76	6	Kabupaten Toba	2010	9,67
		2023	8,84			2011	9,71
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	2010	7,87			2012	9,75
		2011	7,92			2013	9,79
		2012	7,96			2014	9,83
		2013	8,04			2015	10,08
		2014	8,22			2016	10,09
		2015	8,27			2017	10,1
		2016	8,35			2018	10,34
		2017	8,67			2019	10,36
		2018	8,7			2020	10,52
		2019	8,97			2021	10,57
		2020	9,28			2022	10,58
		2021	9,29			2023	10,59
		2022	9,34	7	Kabupaten Labuan Batu	2010	8,17
		2023	9,51			2011	8,32
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	2010	7,36			2012	8,46
		2011	7,41			2013	8,6

No	Wilayah	Tahun	RLS
		2014	8,68
		2015	8,75
		2016	8,78
		2017	9,01
		2018	9,04
		2019	9,23
		2020	9,24
		2021	9,25
		2022	9,4
		2023	9,49
8	Kabupaten Asahan	2010	7,57
		2011	7,71
		2012	7,8
		2013	7,89
		2014	7,98
		2015	8,32
		2016	8,33
		2017	8,46
		2018	8,47
		2019	8,49
		2020	8,79
		2021	8,8
9	Kabupaten Simalungun	2022	8,82
		2023	8,83
		2010	8,31
		2011	8,33
		2012	8,35
		2013	8,37
		2014	8,7
		2015	8,8
		2016	8,86
		2017	8,95
		2018	9,18
		2019	9,36
10	Kabupaten Dairi	2020	9,6
		2021	9,61
		2022	9,63
		2023	9,72
		2010	8,29
		2011	8,41
		2012	8,54
		2013	8,58
		2014	8,59
		2015	8,69
		2016	8,7
		2017	8,9
11	Kabupaten Karo	2018	9,15
		2019	9,34
		2020	9,58
		2021	9,59
		2022	9,72
		2023	9,88
		2010	8,88
		2011	9,03
		2012	9,17
		2013	9,25
		2014	9,33
		2015	9,5

No	Wilayah	Tahun	RLS
		2016	9,51
		2017	9,54
		2018	9,55
		2019	9,62
		2020	9,79
		2021	10
		2022	10,02
		2023	10,03
12	Kabupaten Deli Serdang	2010	9,19
		2011	9,2
		2012	9,21
		2013	9,37
		2014	9,46
		2015	9,48
		2016	9,68
		2017	9,7
		2018	9,92
		2019	10,08
		2020	10,09
		2021	10,1
13	Kabupaten Langkat	2022	10,27
		2023	10,28
		2010	7,48
		2011	7,59
		2012	7,69
		2013	7,69
		2014	7,85
		2015	7,92
		2016	8,18
		2017	8,51
		2018	8,52
		2019	8,64
14	Kabupaten Nias Selatan	2020	8,65
		2021	8,66
		2022	8,68
		2023	8,73
		2010	3,35
		2011	3,75
		2012	3,8
		2013	4,28
		2014	4,64
		2015	4,64
		2016	4,65
		2017	4,95
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	2018	5,2
		2019	5,53
		2020	5,85
		2021	6,06
		2022	6,23
		2023	6,48
		2010	8,57
		2011	8,65
		2012	8,76
		2013	8,8
		2014	8,88
		2015	8,9
		2016	8,91
		2017	9,1

No	Wilayah	Tahun	RLS
		2018	9,28
		2019	9,53
		2020	9,54
		2021	9,71
		2022	10
		2023	10,01
16	Kabupaten Pakpak Bharat	2010	7,45
		2011	7,77
		2012	8,08
		2013	8,25
		2014	8,39
		2015	8,45
		2016	8,46
		2017	8,47
		2018	8,48
		2019	8,73
		2020	9,03
		2021	9,14
		2022	9,39
		2023	9,61
17	Kabupaten Samosir	2010	8,36
		2011	8,41
		2012	8,46
		2013	8,52
		2014	8,57
		2015	8,84
		2016	8,94
		2017	8,95
		2018	9,14
		2019	9,15
		2020	9,43
		2021	9,44
		2022	9,46
		2023	9,47
18	Kabupaten Serdang Bedagai	2010	7,69
		2011	7,74
		2012	7,78
		2013	8,02
		2014	8,04
		2015	8,08
		2016	8,34
		2017	8,35
		2018	8,51
		2019	8,53
		2020	8,54
		2021	8,69
		2022	8,71
		2023	8,85
19	Kabupaten Batu Bara	2010	7,41
		2011	7,47
		2012	7,53
		2013	7,7
		2014	7,72
		2015	7,74
		2016	7,75
		2017	7,83
		2018	7,84
		2019	8,02

No	Wilayah	Tahun	RLS
		2020	8,06
		2021	8,07
		2022	8,26
		2023	8,5
		2010	8,37
		2011	8,39
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2012	8,4
		2013	8,41
		2014	8,44
		2015	8,91
		2016	8,92
		2017	8,93
		2018	9,06
		2019	9,1
		2020	9,37
		2021	9,38
		2022	9,46
		2023	9,55
21	Kabupaten Padang Lawas	2010	7,65
		2011	7,97
		2012	8,13
		2013	8,14
		2014	8,16
		2015	8,4
		2016	8,41
		2017	8,43
		2018	8,67
		2019	8,69
		2020	9,01
		2021	9,02
		2022	9,31
		2023	9,43
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2010	7,49
		2011	7,73
		2012	7,95
		2013	8,25
		2014	8,67
		2015	8,68
		2016	8,69
		2017	8,7
		2018	8,71
		2019	8,74
		2020	8,75
		2021	8,9
		2022	8,92
		2023	8,93
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2010	7,44
		2011	7,75
		2012	7,92
		2013	8,1
		2014	8,27
		2015	8,31
		2016	8,33
		2017	8,34
		2018	8,35
		2019	8,36
		2020	8,4
		2021	8,41

No	Wilayah	Tahun	RLS
24	Kabupaten Nias Utara	2022	8,64
		2023	8,87
		2010	5,25
		2011	5,36
		2012	5,46
		2013	5,55
		2014	6,05
		2015	6,06
		2016	6,07
		2017	6,08
		2018	6,09
		2019	6,25
		2020	6,58
		2021	6,77
		2022	6,78
		2023	6,85
25	Kabupaten Nias Barat	2010	4,65
		2011	4,78
		2012	5,18
		2013	5,25
		2014	5,73
		2015	5,74
		2016	5,77
		2017	5,78
		2018	6
		2019	6,14
		2020	6,49
		2021	6,69
		2022	6,97
		2023	7,07
26	Kota Sibolga	2010	9,33
		2011	9,53
		2012	9,53
		2013	9,73
		2014	9,83
		2015	9,85
		2016	9,86
		2017	9,87
		2018	9,91
		2019	10,18
		2020	10,4
		2021	10,41
		2022	10,43
		2023	10,44
27	Kota Tanjungbalai	2010	8,53
		2011	8,66
		2012	8,88
		2013	8,9
		2014	9,03
		2015	9,12
		2016	9,13
		2017	9,14
		2018	9,24
		2019	9,26
		2020	9,44
		2021	9,45
		2022	9,55
		2023	9,68

No	Wilayah	Tahun	RLS
28	Kota Pematangsiantar	2010	10,39
		2011	10,43
		2012	10,62
		2013	10,62
		2014	10,7
		2015	10,73
		2016	10,75
		2017	11,06
		2018	11,08
		2019	11,15
		2020	11,16
		2021	11,29
		2022	11,31
		2023	11,58
29	Kota Tebing Tinggi	2010	9,5
		2011	9,69
		2012	9,86
		2013	10,04
		2014	10,05
		2015	10,06
		2016	10,07
		2017	10,09
		2018	10,24
		2019	10,28
		2020	10,31
		2021	10,44
		2022	10,65
		2023	10,86
30	Kota Medan	2010	10,54
		2011	10,63
		2012	10,72
		2013	10,76
		2014	10,88
		2015	11
		2016	11,18
		2017	11,25
		2018	11,37
		2019	11,38
		2020	11,39
		2021	11,48
		2022	11,5
		2023	11,62
31	Kota Binjai	2010	9,48
		2011	9,61
		2012	9,74
		2013	9,75
		2014	9,77
		2015	10,28
		2016	10,28
		2017	10,58
		2018	10,75
		2019	10,77
		2020	10,93
		2021	10,94
		2022	11,18
		2023	11,19
32	Kota Padangsidimpuan	2010	10,02
		2011	10,04

No	Wilayah	Tahun	RLS
		2012	10,05
		2013	10,1
		2014	10,13
		2015	10,47
		2016	10,48
		2017	10,56
		2018	10,63
		2019	10,7
		2020	11
		2021	11,09
		2022	11,11
		2023	11,12
33	Kota Gunungsitoli	2010	7,05

No	Wilayah	Tahun	RLS
		2011	7,2
		2012	7,55
		2013	8,16
		2014	8,17
		2015	8,18
		2016	8,2
		2017	8,4
		2018	8,41
		2019	8,58
		2020	8,61
		2021	8,62
		2022	8,64
		2023	8,65

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara dari tahun 2010 hingga 2023. Rata-Rata Lama Sekolah ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan di masing-masing wilayah, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Secara keseluruhan memperlihatkan tren peningkatan yang positif. Peningkatan paling menonjol terjadi di wilayah kepulauan Nias, Kabupaten Nias Barat mencatatkan kenaikan RLS tertinggi sebesar 2,42 tahun, diikuti oleh Kabupaten Nias Utara dengan peningkatan 1,82 tahun, dan Kabupaten Nias Selatan sebesar 1,57 tahun. Wilayah lain seperti Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Utara juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, masing-masing sebesar 0,93 dan 1,18 tahun. Sementara sebagian besar kabupaten/kota lainnya turut mengalami kenaikan RLS, peningkatannya cenderung lebih moderat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi kemajuan dalam rata-rata tahun bersekolah penduduk di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara selama kurun waktu 2010-2023, meskipun tingkat peningkatannya bervariasi antar kabupaten/kota. Dari angka Rata Lama Sekolah tersebut, dapat menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan menjadi indikator penting dalam meningkatkan pembangunan manusia dalam mengurangi rasio gini setiap wilayah.

4.1.3 Angka Harapan Hidup (AHH)

Sektor kesehatan adalah salah satu sektor prioritas yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pembangunan bidang kesehatan, di mana peningkatan sektor kesehatan dapat melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan

pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat melihat perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) suatu wilayah. (Wardhana & Kharisma, 2020). Angka Harapan Hidup adalah perhitungan seseorang dapat bertahan hidup berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, kesehatan, dan faktor lain yang memengaruhi. Angka Harapan Hidup bervariasi seiring berjalannya waktu pada setiap negara. Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam sistem perawatan kesehatan, gaya hidup, dan faktor-faktor lainnya. Penting untuk dicatat bahwa Angka Harapan Hidup adalah perkiraan statistik dan tidak menentukan berapa lama seseorang akan hidup secara individu. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi harapan hidup seseorang, termasuk faktor genetik, gaya hidup sehat, lingkungan, dan akses ke perawatan kesehatan yang baik (Faqih Fawwaz Muhammad, et al, 2024). Adapun, Angka Harapan Hidup (AHH) di 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4. 3 Angka Harapan Hidup (AHH) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023 (Tahun)

No	Wilayah	Tahun	AHH
1	Kabupaten Nias	2010	68,45
		2011	68,58
		2012	68,69
		2013	68,77
		2014	68,87
		2015	68,97
		2016	69,07
		2017	69,18
		2018	69,43
		2019	69,68
		2020	69,75
		2021	69,78
		2022	70,06
		2023	71,74
2	Kabupaten Mandailing Natal	2010	60,6
		2011	60,77
		2012	60,95
		2013	61,08
		2014	61,18
		2015	61,58
		2016	61,77
		2017	61,97
		2018	62,24
		2019	62,51
		2020	62,6
		2021	62,65
		2022	63,05
		2023	71,72
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	2010	62,42
		2011	62,64
		2012	62,87
		2013	63,04
		2014	63,14
		2015	63,74
		2016	64,01
		2017	64,28
		2018	64,55
		2019	64,82
		2020	64,91
		2021	64,97
		2022	65,28
		2023	71,61
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	2010	66,43
		2011	66,45
		2012	66,46
		2013	66,47
		2014	66,49
		2015	66,59
		2016	66,62
		2017	66,66
		2018	66,82
		2019	67,08
		2020	67,15
		2021	67,24
		2022	67,58
		2023	71,76

No	Wilayah	Tahun	AHH
5	Kabupaten Tapanuli Utara	2010	66,76
		2011	66,91
		2012	67,05
		2013	67,15
		2014	67,25
		2015	67,55
		2016	67,71
		2017	67,86
		2018	68,11
		2019	68,46
		2020	68,63
		2021	68,76
		2022	69,16
6	Kabupaten Toba	2023	74,1
		2010	68,59
		2011	68,72
		2012	68,86
		2013	68,94
		2014	69,04
		2015	69,14
		2016	69,25
		2017	69,36
		2018	69,59
		2019	69,93
		2020	70,08
		2021	70,29
7	Kabupaten Labuan Batu	2022	70,76
		2023	74,22
		2010	69,16
		2011	69,19
		2012	69,22
		2013	69,24
		2014	69,26
		2015	69,36
		2016	69,4
		2017	69,44
		2018	69,6
		2019	69,86
		2020	69,93
8	Kabupaten Asahan	2021	69,95
		2022	70,37
		2023	72,88
		2010	66,85
		2011	66,98
		2012	67,1
		2013	67,17
		2014	67,27
		2015	67,37
		2016	67,47
		2017	67,57
		2018	67,79
		2019	68,11
9	Kabupaten Simalungun	2020	68,26
		2021	68,37
		2022	68,73
		2023	73,39
		2010	69,87
		2011	69,98

No	Wilayah	Tahun	AHH
		2012	70,08
		2013	70,14
		2014	70,24
		2015	70,34
		2016	70,43
		2017	70,53
		2018	70,75
		2019	71,07
		2020	71,22
		2021	71,37
		2022	71,78
		2023	74,08
10	Kabupaten Dairi	2010	66,92
		2011	67,09
		2012	67,26
		2013	67,38
		2014	67,48
		2015	67,78
		2016	67,95
		2017	68,13
		2018	68,41
		2019	68,79
		2020	69
		2021	69,19
		2022	69,64
11	Kabupaten Karo	2023	74,13
		2010	70,29
		2011	70,32
		2012	70,34
		2013	70,38
		2014	70,42
		2015	70,62
		2016	70,69
		2017	70,77
		2018	70,97
		2019	71,27
		2020	71,4
		2021	71,58
12	Kabupaten Deli Serdang	2022	72,03
		2023	74,16
		2010	70,74
		2011	70,75
		2012	70,76
		2013	70,78
		2014	70,8
		2015	71
		2016	71,06
		2017	71,11
		2018	71,31
		2019	71,61
		2020	71,73
13	Kabupaten Langkat	2021	71,77
		2022	72,07
		2023	73,65
		2010	66,86
		2011	67
		2012	67,14
		2013	67,23

No	Wilayah	Tahun	AHH
		2014	67,33
		2015	67,63
		2016	67,79
		2017	67,94
		2018	68,22
		2019	68,59
		2020	68,8
		2021	68,97
		2022	69,39
		2023	74,14
14	Kabupaten Nias Selatan	2010	66,82
		2011	66,91
		2012	67,01
		2013	67,06
		2014	67,16
		2015	67,66
		2016	67,83
		2017	68
		2018	68,24
		2019	68,58
		2020	68,74
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	2021	68,86
		2022	69,21
		2023	71,61
		2010	67,42
		2011	67,52
		2012	67,63
		2013	67,7
		2014	67,8
		2015	68,1
		2016	68,26
		2017	68,41
16	Kabupaten Pakpak Bharat	2018	68,69
		2019	69,06
		2020	69,27
		2021	69,51
		2022	70,02
		2023	74,07
		2010	64,35
		2011	64,37
		2012	64,39
		2013	64,42
		2014	64,45
17	Kabupaten Samosir	2015	64,85
		2016	64,95
		2017	65,05
		2018	65,27
		2019	65,59
		2020	65,74
		2021	65,96
		2022	66,44
		2023	72,61
		2010	69,23
		2011	69,36
		2012	69,48
		2013	69,56
		2014	69,66
		2015	70,26

No	Wilayah	Tahun	AHH
		2016	70,47
		2017	70,68
		2018	70,87
		2019	71,16
		2020	71,27
		2021	71,41
		2022	71,82
		2023	74,1
18	Kabupaten Serdang Bedagai	2010	66,66
		2011	66,84
		2012	67,03
		2013	67,17
		2014	67,27
		2015	67,47
		2016	67,63
		2017	67,79
		2018	68,08
		2019	68,46
		2020	68,68
19	Kabupaten Batu Bara	2021	68,82
		2022	69,21
		2023	73,11
		2010	65,06
		2011	65,19
		2012	65,32
		2013	65,4
		2014	65,5
		2015	65,8
		2016	65,95
		2017	66,1
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2018	66,38
		2019	66,75
		2020	66,96
		2021	67,13
		2022	67,55
		2023	72,63
		2010	66,31
		2011	66,33
		2012	66,36
		2013	66,38
		2014	66,4
21	Kabupaten Padang Lawas	2015	66,5
		2016	66,54
		2017	66,58
		2018	66,77
		2019	67,06
		2020	67,17
		2021	67,22
		2022	67,53
		2023	71,57
		2010	65,84
		2011	65,89
		2012	65,93
		2013	65,97
		2014	66,01
		2015	66,31
		2016	66,4
		2017	66,5

No	Wilayah	Tahun	AHH
		2018	66,69
		2019	66,98
		2020	67,09
		2021	67,13
		2022	67,43
		2023	71,52
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2010	67,97
		2011	67,99
		2012	68,01
		2013	68,03
		2014	68,06
		2015	68,09
		2016	68,11
		2017	68,14
		2018	68,39
		2019	68,64
		2020	68,71
		2021	68,81
		2022	69,16
		2023	72,46
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2010	68,17
		2011	68,27
		2012	68,36
		2013	68,4
		2014	68,5
		2015	68,7
		2016	68,8
		2017	68,91
		2018	69,09
		2019	69,37
		2020	69,46
		2021	69,56
		2022	69,91
		2023	74,06
24	Kabupaten Nias Utara	2010	68,12
		2011	68,23
		2012	68,33
		2013	68,39
		2014	68,49
		2015	68,59
		2016	68,68
		2017	68,77
		2018	68,98
		2019	69,29
		2020	69,43
		2021	69,55
		2022	69,9
		2023	72,12
25	Kabupaten Nias Barat	2010	67,15
		2011	67,31
		2012	67,44
		2013	67,54
		2014	67,64
		2015	67,94
		2016	68,1
		2017	68,28
		2018	68,5
		2019	68,82

No	Wilayah	Tahun	AHH
		2020	68,96
		2021	69,08
		2022	69,43
		2023	72,3
		2010	66,82
		2011	67
26	Kota Sibolga	2012	67,17
		2013	67,3
		2014	67,4
		2015	67,7
		2016	67,87
		2017	68,05
		2018	68,36
		2019	68,77
		2020	69,01
		2021	69,25
		2022	69,77
		2023	74,02
27	Kota Tanjungbalai	2010	60,96
		2011	61,09
		2012	61,23
		2013	61,3
		2014	61,4
		2015	61,9
		2016	62,09
		2017	62,28
		2018	62,6
		2019	63,02
		2020	63,27
		2021	63,44
		2022	63,87
		2023	74,01
28	Kota Pematangsiantar	2010	71,44
		2011	71,51
		2012	71,57
		2013	71,59
		2014	71,69
		2015	72,29
		2016	72,46
		2017	72,63
		2018	72,93
		2019	73,33
		2020	73,55
		2021	73,77
		2022	74,25
		2023	74,75
29	Kota Tebing Tinggi	2010	69,8
		2011	69,87
		2012	69,92
		2013	69,94
		2014	70,04
		2015	70,14
		2016	70,21
		2017	70,28
		2018	70,47
		2019	70,76
		2020	70,87
		2021	70,95

No	Wilayah	Tahun	AHH
30	Kota Medan	2022	71,29
		2023	74,07
		2010	71,98
		2011	72,03
		2012	72,08
		2013	72,13
		2014	72,18
		2015	72,28
		2016	72,34
		2017	72,4
		2018	72,64
		2019	72,98
		2020	73,14
		2021	73,23
31	Kota Binjai	2022	73,58
		2023	74,76
		2010	71,2
		2011	71,25
		2012	71,29
		2013	71,34
		2014	71,39
		2015	71,59
		2016	71,67
		2017	71,75
		2018	71,95
		2019	72,25
		2020	72,38
		2021	72,45
		2022	72,79

No	Wilayah	Tahun	AHH
32	Kota Padangsidimpuan	2023	74,18
		2010	68,08
		2011	68,13
		2012	68,18
		2013	68,22
		2014	68,27
		2015	68,32
		2016	68,37
		2017	68,41
		2018	68,73
		2019	69,15
		2020	69,41
		2021	69,5
		2022	69,84
33	Kota Gunungsitoli	2023	73,54
		2010	69,98
		2011	70,03
		2012	70,08
		2013	70,13
		2014	70,19
		2015	70,29
		2016	70,36
		2017	70,42
		2018	70,67
		2019	71,02
		2020	71,19
		2021	71,32
		2022	71,71
		2023	74,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, Angka Harapan Hidup (AHH) di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara dari tahun 2010 hingga 2023. AHH adalah indikator yang mencerminkan rata-rata usia yang diharapkan seseorang dapat hidup, yang sering digunakan untuk menilai kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Kabupaten Nias Barat yang mengalami kenaikan dari 60,06 tahun 2010 menjadi 72,72 tahun 2023, dengan peningkatan sebesar 12,66 tahun. Kabupaten Nias Utara juga menunjukkan peningkatan yang besar dari 60,42 tahun 2010 menjadi 72,06 tahun 2023, yaitu sebesar 11,64 tahun. Selain itu, Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan dari 68,45 tahun 2010 menjadi 74,76 tahun 2023, dengan peningkatan 6,31 tahun. Sementara sebagian besar wilayah lainnya juga mencatatkan peningkatan AHH, meskipun dengan besaran yang bervariasi. Peningkatan AHH ini mencerminkan perbaikan dalam layanan kesehatan, gizi, dan kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut, yang penting untuk pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih baik di masa depan.

4.1.4 Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu secara ekonomi dalam mencapai taraf hidup rata-rata masyarakat dalam suatu wilayah. Kondisi seperti ini dapat diketahui dari kurangnya jumlah pendapatan guna memenuhi kebutuhan primer. Rendahnya pendapatan ini juga berakibat pada kurangnya kesempatan dalam memenuhi standar hidup lainnya seperti standar kesehatan dan pendidikan minimal di masyarakat (Akhmad Syarif Helwani, 2022). Dalam menghitung Jumlah Penduduk Miskin ada aspek yang cukup sulit dilakukan, yaitu menentukan garis kemiskinan dan memastikan tingkat perbandingan kesejahteraan yang sama jika garis tersebut dihitung pada waktu yang berbeda (Meli Sukawati, et all, 2022). Adapun, Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023 (Jiwa)

No	Wilayah	Tahun	JPM
1	Kabupaten Nias	2010	26,4
		2011	25,39
		2012	24,99
		2013	23,28
		2014	22,21
		2015	24,53
		2016	24,11
		2017	24,88
		2018	22,61
		2019	22,1
		2020	23,12
		2021	24,33
		2022	23,23
		2023	21,99
2	Kabupaten Mandailing Natal	2010	50,9
		2011	49,05
		2012	48,38
		2013	40,69
		2014	39,68
		2015	47,79
		2016	47,67
		2017	48,3
		2018	42,39
		2019	40,64
		2020	41,31
		2021	43,24
		2022	40,98
		2023	41,04
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	2010	31,5
		2011	30,39
		2012	29,91
		2013	30,77
		2014	29,38
		2015	31,2
		2016	30,84
		2017	29,48
		2018	25,63
		2019	24,22
		2020	23,96
		2021	25,01
		2022	23,05
		2023	20,09
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	2010	52,2
		2011	50,21
		2012	49,61
		2013	52
		2014	49,86
		2015	52,2
		2016	51,77
		2017	53,05
		2018	48,53
		2019	46,99
		2020	47,19
		2021	49,95
		2022	47,07
		2023	47,09
5	Kabupaten Tapanuli Utara	2010	34,9
		2011	33,57
		2012	33,09
		2013	33,75

No	Wilayah	Tahun	JPM
		2014	32,23
		2015	33,37
		2016	33,2
		2017	33,75
		2018	29,2
		2019	28,57
		2020	28,41
		2021	29,72
		2022	27,47
		2023	26,39
6	Kabupaten Toba	2010	17,6
		2011	16,93
		2012	16,64
		2013	16,96
		2014	16,51
		2015	18,31
		2016	18,2
		2017	18,49
		2018	15,82
		2019	15,78
		2020	16,05
		2021	16,61
		2022	16,48
		2023	14,94
7	Kabupaten Labuan Batu	2010	44,3
		2011	42,61
		2012	42,08
		2013	38,14
		2014	37,35
		2015	41,63
		2016	41,94
		2017	42,35
		2018	41,7
		2019	41,52
		2020	42,17
		2021	45,03
		2022	43,27
8	Kabupaten Asahan	2010	76,3
		2011	73,39
		2012	72,32
		2013	80,54
		2014	76,97
		2015	85,16
		2016	84,35
		2017	83,67
		2018	74,14
		2019	70,53
		2020	66,32
		2021	69,29
		2022	64,49
		2023	61,69
9	Kabupaten Simalungun	2010	87,7
		2011	84,35
		2012	83,09
		2013	87,72
		2014	86,25
		2015	92,89

No	Wilayah	Tahun	JPM
		2016	92,19
		2017	91,35
		2018	80,3
		2019	76,33
		2020	73,64
		2021	76,99
		2022	72,47
		2023	69,21
10	Kabupaten Dairi	2010	26,9
		2011	25,87
		2012	25,49
		2013	24
		2014	23,35
		2015	25,33
		2016	24,94
		2017	24,98
		2018	23,19
		2019	21,86
		2020	22,93
		2021	23,72
		2022	22,53
		2023	21,42
11	Kabupaten Karo	2010	38,7
		2011	37,22
		2012	36,71
		2013	36,93
		2014	35,36
		2015	37,52
		2016	38,74
		2017	40,02
		2018	35,36
		2019	34,08
		2020	36,57
		2021	38,01
		2022	35,93
		2023	35,65
12	Kabupaten Deli Serdang	2010	96
		2011	92,33
		2012	91,19
		2013	91,97
		2014	90,92
		2015	95,65
		2016	100,09
		2017	97,09
		2018	88,52
		2019	84,94
		2020	86,26
		2021	92,52
		2022	85,28
		2023	82,75
13	Kabupaten Langkat	2010	104,8
		2011	100,8
		2012	99,27
		2013	104,31
		2014	100,63
		2015	114,19
		2016	115,79
		2017	114,41

No	Wilayah	Tahun	JPM
		2018	105,46
		2019	103,08
		2020	101,87
		2021	106,59
		2022	100,45
		2023	98,16
14	Kabupaten Nias Selatan	2010	60,1
		2011	57,8
		2012	56,94
		2013	56,96
		2014	54,46
		2015	58,97
		2016	57,75
		2017	57,95
		2018	52,7
		2019	52,51
		2020	53,88
		2021	55,16
		2022	54,16
		2023	54,29
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	2010	18,2
		2011	17,5
		2012	17,25
		2013	17,94
		2014	17,14
		2015	18,04
		2016	18,04
		2017	18,35
		2018	16,93
		2019	16,6
		2020	17,92
		2021	18,71
		2022	17,33
		2023	17,14
16	Kabupaten Pakpak Bharat	2010	5,6
		2011	5,39
		2012	5,32
		2013	4,94
		2014	4,72
		2015	5,12
		2016	4,95
		2017	4,95
		2018	4,66
		2019	4,52
		2020	4,59
		2021	4,79
		2022	4,52
		2023	4,01
17	Kabupaten Samosir	2010	19,7
		2011	18,95
		2012	18,48
		2013	17,18
		2014	16,27
		2015	17,64
		2016	18,01
		2017	18,43
		2018	16,81
		2019	15,79

No	Wilayah	Tahun	JPM
		2020	15,8
		2021	16,08
		2022	14,97
		2023	14,86
18	Kabupaten Serdang Bedagai	2010	62,8
		2011	60,5
		2012	59,53
		2013	56,55
		2014	54,48
		2015	58,3
		2016	58,17
		2017	56,93
		2018	50,49
		2019	48,69
		2020	49,18
		2021	51,16
		2022	48,22
		2023	45,88
19	Kabupaten Batu Bara	2010	46
		2011	44,34
		2012	43,66
		2013	46,86
		2014	44,72
		2015	50,37
		2016	49,42
		2017	50,91
		2018	51,78
		2019	50,46
		2020	49,78
		2021	52,59
		2022	49,39
		2023	49,18
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2010	25
		2011	24,04
		2012	23,72
		2013	25,01
		2014	23,86
		2015	27,67
		2016	27,88
		2017	27,98
		2018	26,82
		2019	26,06
		2020	26,79
		2021	28,37
		2022	26,09
		2023	26,17
21	Kabupaten Padang Lawas	2010	25
		2011	24,04
		2012	23,64
		2013	21,23
		2014	20,34
		2015	22,38
		2016	22,8
		2017	24,42
		2018	23,05
		2019	23,17
		2020	23,87
		2021	25,78

No	Wilayah	Tahun	JPM
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2022	24,45
		2023	24,51
		2010	43,4
		2011	41,74
		2012	41,21
		2013	37,33
		2014	35,65
		2015	36,37
		2016	36,62
		2017	37,82
		2018	33,14
		2019	30,17
		2020	28,63
		2021	30,36
		2022	29,38
		2023	29,83
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2010	40,9
		2011	39,34
		2012	38,68
		2013	39,09
		2014	37,3
		2015	39,59
		2016	38,81
		2017	40,24
		2018	36,45
		2019	34,76
		2020	34,86
		2021	37,13
		2022	33,91
		2023	34,13
24	Kabupaten Nias Utara	2010	40,7
		2011	39,15
		2012	38,51
		2013	40,78
		2014	38,95
		2015	43,74
		2016	41,66
		2017	39,47
		2018	36,33
		2019	34,42
		2020	34,74
		2021	35,84
		2022	32,87
		2023	30,78
25	Kabupaten Nias Barat	2010	25,1
		2011	24,24
		2012	23,84
		2013	24,88
		2014	23,76
		2015	25,41
		2016	24,16
		2017	23,33
		2018	23
		2019	22,08
		2020	22,33
		2021	21,75
		2022	20,42
		2023	18,86

No	Wilayah	Tahun	JPM
26	Kota Sibolga	2010	11,7
		2011	11,25
		2012	11,13
		2013	11,08
		2014	10,57
		2015	11,64
		2016	11,54
		2017	11,91
		2018	10,81
		2019	10,82
		2020	10,49
		2021	10,8
		2022	10,05
		2023	10,02
27	Kota Tanjungbalai	2010	25,2
		2011	24,24
		2012	23,86
		2013	24,2
		2014	23,17
		2015	25,09
		2016	24,42
		2017	24,69
		2018	25,3
		2019	24,54
		2020	23,54
		2021	24,1
		2022	22,65
		2023	22,45
28	Kota Pematangsiantar	2010	27,5
		2011	26,45
		2012	26,01
		2013	26,61
		2014	25,43
		2015	25,83
		2016	24,88
		2017	25,35
		2018	22,01
		2019	21,99
		2020	21,23
		2021	22,06
		2022	20,53
		2023	18,96
29	Kota Tebing Tinggi	2010	18,9
		2011	18,27
		2012	18,02
		2013	17,98
		2014	17,2
		2015	18,8
		2016	18,52
		2017	19,06
		2018	16,64
		2019	16,3
		2020	16,32
		2021	17,37
		2022	16,34
		2023	16,36
30	Kota Medan	2010	212,3
		2011	204,19

No	Wilayah	Tahun	JPM
		2012	201,06
		2013	209,69
		2014	200,32
		2015	207,5
		2016	206,87
		2017	204,22
		2018	186,45
		2019	183,79
		2020	183,54
		2021	193,03
		2022	187,74
		2023	187,28
31	Kota Binjai	2010	18
		2011	17,41
		2012	17,16
		2013	17,48
		2014	16,72
		2015	18,6
		2016	17,8
		2017	18,23
		2018	16,07
		2019	15,61
		2020	15,91
		2021	16,46
		2022	14,61
		2023	13,85
32		2010	20,3

No	Wilayah	Tahun	JPM
	Kota Padangsidempuan	2011	19,52
		2012	19,24
		2013	18,44
		2014	17,65
		2015	18,36
		2016	17,65
		2017	17,76
		2018	16,79
		2019	16,06
		2020	16,56
		2021	17,28
		2022	16,03
		2023	16,15
33	Kota Gunungsitoli	2010	42,5
		2011	40,97
		2012	40,4
		2013	41,1
		2014	37,2
		2015	34,47
		2016	32,17
		2017	30,08
		2018	25,91
		2019	23,06
		2020	23,54
		2021	24,02
		2022	21,85
		2023	22,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara dari tahun 2010 hingga 2023. Jumlah Penduduk Miskin (JPM) adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Secara umum, data menunjukkan tren penurunan JPM di sebagian besar wilayah, meskipun ada beberapa fluktuasi. Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengalami penurunan dari 50,9 ribu jiwa (2010) menjadi 41,04 ribu jiwa (2023), dengan penurunan sebesar 9,86 ribu jiwa. Penurunan signifikan juga terjadi di Tapanuli Selatan dari 53,5 ribu jiwa (2010) menjadi 41,09 ribu jiwa (2023), yaitu sebesar 12,41 ribu jiwa. Sementara itu, beberapa wilayah justru mengalami peningkatan Jumlah Penduduk Miskin (JPM), seperti Karo yang meningkat dari 38,7 ribu jiwa (2010) menjadi 82,75 ribu jiwa (2023), dengan lonjakan yang cukup besar yaitu 44,05 ribu jiwa. Peningkatan juga terlihat di Deli Serdang dari 96 ribu jiwa (2010) menjadi 198,16 ribu jiwa (2023), dengan kenaikan 102,16 ribu jiwa. Wilayah lainnya menunjukkan fluktuasi Jumlah Penduduk Miskin tanpa tren penurunan yang konsisten.

Penurunan JPM ini mencerminkan upaya yang lebih baik dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang penting untuk pengembangan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih efektif di masa depan.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Pemilihan Teknik Regresi Data Panel

Pemilihan teknik estimasi regresi data panel dikenal tiga macam pendekatan estimasi yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan teknik terbaik yang akan digunakan untuk regresi data panel maka dilakukan pengujian yaitu Uji *Chow* dan Uji *Hausman*.

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi pendekatan yang baik pada data panel. Dengan melihat nilai probabilitas *Cross-Section F* nya. Adapun hipotesis dari pengujian ini sebagai berikut

- Common Effect Model* (CEM) paling tepat digunakan apabila nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section F* $> 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 diterima.
- Fixed Effect Model* (FEM) akan paling tepat digunakan apabila nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section F* $< 0,05$ (nilai signifikan) maka H_a ditolak

Berdasarkan hasil dari Uji *Chow*, maka di dapat probabilitas *Cross-section F* sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	14.128928	(31,413)	0.0000
Cross-section Chi-square	323.886405	31	0.0000

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 5

Berdasarkan hasil Uji *Chow* pada tabel 4.5 di atas, menunjukkan nilai probabilitas *Chi-square* sebesar $0.0000 < \alpha (0,05)$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan hasil tersebut, menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam estimasi model data panel adalah *Fixed Effect Model*. Untuk tahap selanjutnya, dilakukan Uji *Hausman* untuk mengetahui dan menguji model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*.

2. Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam mengestimasi pendekatan yang baik pada data panel. Dengan melihat nilai probabilitas *Cross-Section F* nya. Adapun hipotesis dari pengujian ini sebagai berikut:

- a. *Random Effect Model* (REM) paling tepat digunakan apabila nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section random* $> 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 diterima.
- b. *Fixed Effect Model* (FEM) akan paling tepat digunakan apabila nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section random* $< 0,05$ (nilai signifikan) maka H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil dari Uji Hausman, maka di dapat probabilitas *Cross-section F* sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq.Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f</i>	<i>Prob</i>
Cross-section Chi-square	45.7114575	3	0.0000

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran, 6

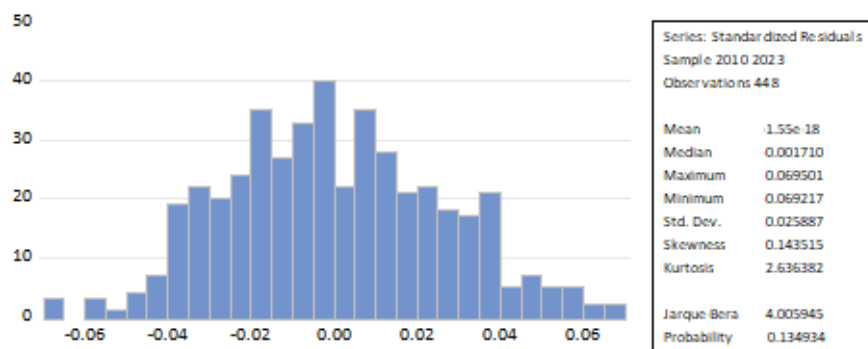
Berdasarkan hasil Uji *Hausman* pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar $0,0000 < \alpha (0,05)$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan hasil tersebut maka menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam estimasi model data panel adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman model yang terpilih adalah model FEM maka tidak diperlukan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

4.2.2 Hasil Asumsi Klasik

Metode yang terpilih adalah FEM, maka dari itu uji asumsi klasik diperlukan. Uji Asumsi Klasik merupakan pengujian analisis yang dipergunakan demi menunjukkan pada uji data panel memiliki masalah-masalah asumsi klasik dan untuk mengetahui model penelitian ini bersifat *Best Linear Underbiased Estimator* (BLUE) ataukah tidak. Uji-uji yang perlu dilakukan pada penelitian ini menurut buku Gujarati dan Porter (2009):

1. Uji Normalitas

Pengujian ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (signifikansi $> 0,05$), maka data dianggap terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,05 (signifikansi $\leq 0,05$), maka data dianggap tidak terdistribusi normal.



Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 7

Gambar 4. 1 Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.5, diketahui bahwa nilai prob. Jarque Bera sebesar 0,134934 di mana lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai prob. Jarque Bera $> 5\%$ (0,05) yang artinya data dalam model penelitian terdistribusi normal atau lulus uji normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen dalam regresi. Uji Multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan metode korelasi parsial antar variabel dengan *rule of thumb* (0,80).

Tabel 4. 7
Uji Multikolinearitas

	RLS	AHH	JPM
RLS	1.000000	0.383779	0.087944
AHH	0.383779	1.000000	0.176513
JPM	0.087944	0.176513	1.000000

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 8

Hasil Uji Multikolinearitas pada tabel 4.7 menunjukkan tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas karena tidak melebihi 0,80 (Ghozali, 2018). Diketahui bahwa nilai untuk variabel Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Jumlah Penduduk Miskin memiliki nilai kurang dari 0,80. Jika melihat hasil Uji Multikolinearitas maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan Uji Asumsi Klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain. Uji Heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi tidak sama variasi dan residual satu pengamatan yang lain.

Tabel 4. 8
Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	0.019141	0.071726	0.266856	0.7897
RLS	0.003640	0.003800	0.958057	0.3386
AHH	-8.030006	1.160005	-0.694495	0.4878
JPM	1.050006	3.780005	0.276419	0.7824

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 9

Hasil Uji Heteroskedastisitas pada tabel 4.8 di atas, nilai probabilitas masing-masing variabel pada Uji Park di atas menunjukkan nilai yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengganggu pada data penelitian ini memiliki varian yang konstan atau terbebas dari masalah heteroskedastisitas disebabkan semua probabilitas masing-masing variabel lebih dari 0,05.

4.2.3 Hasil Estimasi

Hasil estimasi model ditentukan berdasarkan pada beberapa uji yang telah dilakukan. Berdasarkan Uji *Chow* dan Uji *Hausman* yang telah dilakukan pada tabel diatas, diperoleh bahwa model terbaik yang digunakan dalam estimasi model adalah *Fixed Effect Model*. Berikut merupakan hasil estimasi *Fixed Effect Model*.

4.9

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	0.619908	0.071726	8.642692	0.0000
RLS	-0.008631	0.003800	-2.271468	0.0236
AHH	-3.770005	1.160005	-3.259436	0.0012
JPM	-5.420007	3.780006	-0.143254	0.8862
R-squared	0.590309	Mean dependen var		0.283683
Adj.R-Squared	0.556582	S.D. dependen var		0.040495
F-statistic	17.50228	Durbin-Watson stat		1.704447
Prob(F-Statistic)	0.000000			

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 3

Model data panel yang terpilih untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *Fixed Effect Model*, berikut merupakan penjelasan melalui persamaannya:

$$IG = 0.619908 - 0.008631 \cdot RLS - 3.770005 \cdot AHH - 5.420007 \cdot JPM \text{ et.....(4.1)}$$

4.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang terdiri atas Uji Parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji F) dilakukan dengan mengamati, mencermati, dan melihat dari hasil model terpilih yakni *Fixed Effect Model* yang sebelumnya telah melalui pengujian model yang dilakukan oleh Uji Chow dan Uji Hausman.

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menilai kontribusi masing-masing penjelasan dari variabel independen terhadap variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dengan tingkat signifikansi 0,05, statistik Uji t akan dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis harus diterima atau ditolak.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Variabel	t-Statistic	t-tabel	Prob	Keterangan
RSL	-2. 271468	-1.648	0.0236	Negatif Signifikan
AHH	-3.259436	-1.648	0.0012	Negatif Signifikan
JPM	-0.143254	-1.648	0.8862	Tidak signifikan

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 3

Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial pada tabel 4.10 di atas, kriteria (α) = 0,05 dan *degree of demand* atau $df (n-k) = 448 - 4 = 444$) diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.648. Hasil dari uji t adalah sebagai berikut:

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki nilai *t-statistic* -2.271468 > t-tabel -1.648 dan nilai probabilitasnya adalah 0.0236 ($0.0236 < 0.05$) yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif terhadap Rasio Gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023.

b. Angka Harapan Hidup (AHH)

Variabel Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki nilai *t-statistic* -3.259436 > t-tabel -1.648 dan nilai probabilitasnya adalah 0.0000 ($0.0000 < 0.05$) yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka variabel Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh negatif terhadap Rasio Gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023.

c. Jumlah Penduduk Miskin (JPM)

Variabel Jumlah Penduduk Miskin (JPM) memiliki nilai *t-statistic* -0.143254 < t-tabel -1.648 dan nilai probabilitasnya adalah 0.8862 ($0.8862 > 0.05$) yang artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, perubahan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tidak memberikan pengaruh secara statistik terhadap nilai variabel dependen pada tingkat yang ditetapkan.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian analisis *F-statistic* untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh simultan koefisien variabel regresi secara signifikan. Ketentuan penerimaan hipotesis secara simultan yaitu dengan melihat nilai probabilitasnya. Selain itu dapat juga menggunakan perhitungan dengan menggunakan F-hitung dan F-tabel dengan tingkat keyakinan $\alpha = 0.05$, $df_1 (k - 1 = 3)$ dan $df_2 (n - k = 448 - 4 = 444)$, di mana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel penelitian. Hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Uji Simultan (Uji F)

Variabel	F-statistic	F-tabel
RLS, AHH, JPM	17.50228	2.39

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 3

Berdasarkan hasil perhitungan Uji F pada tabel 4.11 di atas, *output* regresi pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), Jumlah Penduduk Miskin (JPM) terhadap Rasio Gini dengan signifikansi 5% (0,05) menghasilkan nilai F-statistic lebih besar dari F tabel ($17.50228 > 2.39$) yang berarti secara bersama-sama simultan variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), Jumlah Penduduk Miskin (JPM) terhadap Rasio Gini.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen, atau regresi dijelaskan oleh variabel penjelas atau regresi di mana nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1 (Gujarati dan Porter 2009:84). Pengujian ini pada intinya mengukur seberapa jauh variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang besar atau mendekati satu artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas

Tabel 4. 12
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Adjusted R-Squared	0.556582
--------------------	----------

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 3

Hasil dari tabel 4.12 di atas mengenai koefisien determinasi dalam penelitian ini diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0. 556582 yang berarti variasi yang terjadi di dalam independen variabel dapat menjelaskan variasi yang terjadi dalam dependen variabel produktivitas tenaga kerja sebesar 44,34% sedangkan sisanya sebesar 44,34% disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar model.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Rasio Gini

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan menggunakan model *Fixed Effect Model*. Nilai koefisien regresi pendidikan melalui variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dapat diketahui nilai probabilitas *t-statistic* diperoleh hasil sebesar 0.0236 dengan koefisien sebesar -0.008631. Hal ini menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki pengaruh negatif terhadap Rasio Gini. Dengan kata lain, peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berhubungan dengan penurunan Rasio Gini, yang berarti ketimpangan pendapatan di masyarakat dapat berkurang seiring dengan meningkatnya pendidikan. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasio gini. Dengan demikian, pendidikan yang lebih baik dapat berkontribusi pada pengurangan rasio gini, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Menurut De Gregorio dan Lee (2002), ditemukan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah yang lebih tinggi secara signifikan berkorelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan. Artinya negara-negara dengan Tingkat Pendidikan rata-rata yang lebih cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata. Selain itu, penelitian ini distribusi Pendidikan yang merata, Di mana ketidakmerataan dalam distribusi pendidikan justru memperburuk rasio gini. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pemerataan akses pendidikan menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan (De Gregorio dan Lee, 2002). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Irfan Saputra, 2023), dimana dalam penelitiannya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio gini. Dapat diartikan apabila nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat 1 persen dan variabel lain dianggap tetap, maka rasio gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara akan menurun sebesar 0,0180. Hasil estimasi ini dapat membuktikan bahwa tingkat pendidikan dapat menurunkan permasalahan rasio gini, dengan melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat berperan dalam dunia kerja. Pendidikan yang baik dan berkualitas dapat berperan dalam membentuk pola pikir seseorang

agar terbiasa berpikir kritis terhadap suatu masalah. Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kinerja yang baik dan produktif, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat.

4.3.2 Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap Rasio Gini

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan menggunakan model *Fixed Effect Model*. Nilai koefisien regresi Kesehatan melalui variabel Angka Harapan Hidup (AHH) dapat diketahui nilai probabilitas *t-statistic* diperoleh hasil sebesar 0.0012 dengan koefisien sebesar -3.770005. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki pengaruh negatif terhadap Rasio Gini. Dengan kata lain, peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan penurunan Rasio Gini, yang berarti ketimpangan pendapatan di masyarakat dapat berkurang seiring dengan meningkatnya pendidikan. Meskipun koefisiennya negatif, nilai probabilitas yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan ini tidak dapat diabaikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa AHH berpengaruh terhadap Rasio Gini. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasio gini. Dengan demikian, kesehatan yang lebih baik dapat berkontribusi pada pengurangan rasio gini, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Menurut (Sen, 1999) teori kapabilitasnya memberikan kerangka yang kuat untuk memahami peningkatan Angka Harapan Hidup (yang mencerminkan kesehatan yang lebih baik) berkontribusi pada pengurangan ketimpangan. Melalui pendekatan kapabilitas, menekankan bahwa pembangunan sejati harus berpusat pada peningkatan kemampuan (kapabilitas) individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai. Kesehatan, yang tercermin dalam Angka Harapan Hidup yang tinggi, merupakan kapabilitas fundamental. Individu yang sehat memiliki kapabilitas yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pasar kerja, dan kegiatan sosial, serta memiliki mobilitas yang lebih baik. Dan sejalan menurut Puspasari (2020) mengemukakan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat penghasilan yang tercermin dalam tingkat pengeluaran keluarga yang rendah dan tingkat upah yang rendah. Pengalaman

menunjukkan bahwa perbaikan tingkat hidup ternyata menghasilkan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Perbaikan kualitas ini akan menunjang pada peningkatan produktivitas yang akan meningkatkan pendapatan dan tingkat kehidupan masyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh (Aliyah & Rahmawati, 2024) dimana dalam penelitiannya bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki pengaruh negatif terhadap rasio gini. Artinya berdasarkan hasil penelitian ini bahwa semakin baik kondisi kesehatan setiap penduduk di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka dapat menurunkan angka rasio gini di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tersebut. Tingginya AHH menunjukkan tingkat kesehatan dimasyarakat semakin berkualitas, sehingga bisa meningkatkan produktivitas untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik dan mendapatkan penghasilan tetap.

4.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin (JPM) terhadap Rasio Gini

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *t-statistic* diperoleh sebesar 0.8862 dengan koefisien sebesar -5.420007. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tidak berpengaruh terhadap Rasio Gini, yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Dengan kata lain JPM berhubungan langsung dengan peningkatan Rasio Gini, yang berarti bahwa semakin banyak individu yang hidup dalam kondisi miskin, semakin besar pula rasio gini yang terjadi di masyarakat.

Menurut teori Kuznetz menjelaskan pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi yang lebih lanjut, diharapkan ketimpangan tersebut akan menurun. Dalam konteks ini, peningkatan JPM dapat mengindikasikan bahwa masyarakat belum mencapai tahap perkembangan yang cukup untuk mengurangi ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, manfaat dari pertumbuhan tersebut tidak merata dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu,

sementara kelompok miskin tetap terpinggirkan. Berdasarkan buku Abihijit V. Bnerjee & Esther Duflo mengemukakan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh distribusi pendapatan (ketimpangan), tetapi lebih oleh bagaimana orang miskin membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya mereka.

Dari hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh (Ersad & Amir, 2022) dan hasil penelitian oleh (Sri Indriyani S Dai, Syarwani Canon, 2023) tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap rasio gini. Pendapatan tidak mempengaruhi kemiskinan hal ini dikarenakan ketika tingkat rata-rata seluruh wilayah masyarakat di suatu wilayah berada di bawah garis kemiskinan maka hal ini tidak dapat mempengaruhi rasio gini, karena distribusi pendapatan tidak merata jika dibandingkan dengan kemiskinan itu sendiri sehingga dapat dikatakan keadaan masyarakat yang masih hidup di bawah rata-rata

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel terhadap 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010-2023, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) terhadap rasio gini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif terhadap Rasio Gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata pendidikan, penduduk berkontribusi pada penurunan rasio gini. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh negatif terhadap Rasio Gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023. Hal ini mengimplikasikan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan usia harapan hidup penduduk berkorelasi dengan penurunan rasio gini. Masyarakat dengan kesehatan yang lebih baik cenderung lebih produktif dan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat mengurangi rasio gini antar kelompok.
3. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tidak berpengaruh terhadap Rasio Gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2023. Meskipun secara teoritis peningkatan kemiskinan dapat memperburuk rasio gini, berdasarkan data dan model yang digunakan dalam penelitian ini, perubahan JPM tidak terbukti menjadi pendorong utama perubahan tingkat rasio gini yang signifikan selama periode penelitian. Hal ini mengimplikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan memungkinkan peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi rasio gini di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010-2023.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran kebijakan dapat diajukan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah rasio gini:

1. Prioritaskan peningkatan kualitas modal manusia

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan investasi dan program yang secara signifikan meningkatkan kualitas modal manusia penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan di semua tingkatan, serta penguatan sistem kesehatan yang merata dan terjangkau. Mengingat pengaruh signifikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) dalam mengurangi rasio gini, kebijakan yang fokus pada peningkatan kedua indikator ini diyakini akan memberikan dampak positif yang substansial terhadap pemerataan ekonomi.

2. Integrasikan Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Peningkatan Modal Manusia

Meskipun JPM tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi rasio gini dalam model ini, kemiskinan tetap menjadi masalah sosial dan ekonomi krusial. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu diintegrasikan dengan program yang secara langsung meningkatkan modal manusia kelompok miskin. Contohnya adalah pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, peningkatan akses ke layanan kesehatan dasar, dan program peningkatan kualitas pendidikan bagi keluarga miskin.

3. Evaluasi Kebijakan Berbasis Bukti

Pemerintah daerah disarankan untuk secara rutin mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengurangi rasio gini, dengan memanfaatkan data akurat dan hasil penelitian. Penelitian lanjutan yang lebih mendalam, mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan, interaksi antar variabel, dan menggunakan metode analisis yang beragam, diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika rasio gini di Provinsi Sumatera Utara dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abihijit V.Bnerjee & Esther Duflo. (2011). Poor economics: a radical rethinking of the way to fight global poverty. In *Choice Reviews Online* (Vol. 49, Issue 03). <https://doi.org/10.5860/choice.49-1575>
- Aini, S. N., & Nugroho, R. yuwono Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.19474>
- Akhmad Syarif Helwani, R. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 217–233.
- Alawiyah, T., & Hasanah, K. (2024). Dampak Kualitas Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan Ekonomi : Sebuah Analisis. *Jurnal Pendidikan*, 5(8), 458–467.
- Aliyah, A. H., & Rahmawati, F. (2024). Analisis determinan tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2016-2022. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(4).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Ht Tp Ag a Ka . B Ps . Id Ht Tp*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024. (2023). Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013-2023. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*. [https://doi.org/Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. \(15 Maret 2024\). Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2023. Diakses pada 19 Maret 2025, dari https://karanganyarkab.bps.go.id/id/news/2024/03/15/144/rata-rata-lama-sekolah-tahun-2023.html](https://doi.org/Badan%20Pusat%20Statistik%20Kabupaten%20Karanganyar.%20(15%20Maret%202024).%20Rata-Rata%20Lama%20Sekolah%20tahun%202023.%20Diakses%20pada%2019%20Maret%202025,%20dari%20https://karanganyarkab.bps.go.id/id/news/2024/03/15/144/rata-rata-lama-sekolah-tahun-2023.html)
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024. (2024). *Angka Harapan Hidup (SP2010) (Tahun), 2022-2023*. Angka Harapan Hidup (SP2010) (Tahun), 2022-2023. [https://doi.org/Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komerling Ilir. \(26 Januari 2024\). Angka Harapan Hidup \(SP2010\), 2022-2023. Diakses pada 20 Maret 2025, dari https://okikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjExIzI=/angka-harapan-hidup--sp2010-.html](https://doi.org/Badan%20Pusat%20Statistik%20Kabupaten%20Ogan%20Komerling%20Ilir.%20(26%20Januari%202024).%20Angka%20Harapan%20Hidup%20(SP2010),%202022-2023.%20Diakses%20pada%2020%20Maret%202025,%20dari%20https://okikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjExIzI=/angka-harapan-hidup--sp2010-.html)
- Bourguignon, F. (2016). *The Poverty-Growth-Inequality Triangle. March*.
- BPS. (2018). *Statistik Pendidikan 2018 (Statistics of Education 2018)*.
- BPS. (2023). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023. *Berita Resmi Statistik, No. 48/07/(17 Juli 2023)*, 1–8.
- Caesarisma, E., & Hamrullah. (2023). Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 2(2), 81–98.
- Cox, A., Smith, A., Mcneill, H., Hilary, N., Ellis, P., Jarvis, R., Jowett, T., Zalk, T., Chiu, V., Joubert, W., & Budhu, Y. (2014). *Readjusting the Rations*. 1–81.

- Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Buku 1, Ed). Salemba Empat.
- De Gregorio, J., & Lee, J. W. (2002). Education and income inequality: New evidence from cross-country data. *Review of Income and Wealth*, 48(3), 395–416. <https://doi.org/10.1111/1475-4991.00060>
- Devi Yuliana Putri, R. S. A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Of Development Economic and Digitalization*, 3(1).
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. (2020). *Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2020*.
- Ersad, M., & Amir, A. (2022). Dampak IPM , tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425–438.
- Fachruurrozi, M., & Hasmarini, I. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 674–680.
- Faqih Fawwaz Muhammad, Fauzan Abdurrahim, Jericho Pandita Gunawan, Monica Tri Rahma, Tsanya Atikah Oktaviana, E. A. (2024). Analysis study : pengaruh faktor AHH (Angka Harapan Hidup) pada masyarakat Provinsi Jawa Tengah tahun. *Instituti for Advanced Science, Social and Substainable Future MORALITY BEFORE KNOWLEDGE*, 1(1), 11–22.
- Gozali, G., & Zuliansyah, Z. (2024). Masa Depan Ibu Kota Nusantara : Pembelajaran Dari Pendirian Ibu Kota Brasilia The Future Of Nusantara Capital : Lesson Learned. 50(2), 209–226. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8830>
- H.Baltagi, B. (1975). Econometric Analysis of Panel Data. In S. Wiley, John (Ed.), *Xenobiotica* (3rd ed., Vol. 5, Issue 7). British Library Cataloging in Publication Data. <https://doi.org/10.3109/00498257509056115>
- Hasan, S., Rumianti, S., & Mervita, E. (2022). Analisis Dampak Kesehatan Masyarakat Terhadap Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus Kotabumi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 197–202. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.2231>
- Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i2.93>
- Kamaruddin, A. (2025). Penerapan Algoritma Linear Regresi Untuk Prediksi Ketimpangan Pendapatan Berdasarkan Gini Ratio Di Provinsi Gorontalo Abstrak. 02(03), 7–14.
- Kemiskinan, P. (2018). *Profil kemiskinan*.

- Kunci, K. (2024). *Analysis study : pengaruh faktor AHH (Angka Harapan Hidup) pada masyarakat Provinsi Jawa Tengah tahun. 1(1)*, 11–22.
- Lesmana, J., Suciana, D., Administrasi, A., & Sakit, R. (2022). Nusadaya Journal of Multidiciplinary Studies. *Nusadaya Journal of Multidiciplinary Studies*, 1(1), 16–22.
- Ludia Ni'matuzzahroh1*, A. T. R. D. (2022). Pemodelan Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) MENGGUNAKAN Pendekatan Regresi Nonparametrik. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 289–301.
- Maria Anita Titu, S.E., M.Pd. Dr. I Made Darsana, S.E., M.M. Lola Rahmadona, S.P., M.Si. Sishadiyati, S.E., M.M. Ariani, S.E., M.Si. Aris Triyono, S.E., M.M. Masruha, S.Sy., M.H. Dr. Misno, S.H.I., S.E., M.E.I. Herty Ramayanti Sinaga, S.E., M.Si. Prof. Dr, A. (2023). *Pengantar Ilmu Ekonomi* (M. S. Dr. Miko Andi Wardana, ST. (ed.); Issue May 2023). Infes Media.
- Meli Sukawati, Rido Simatupang, Jevrianto Butar-Butar, Revina Manurung, P. S. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000-2020. *Journal of Economics and Business*, 03(01), 23–40.
- Muhammad Irfan Saputra, T. Z. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di kota banda aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP)*, 8(3).
- Nakakita, S., Kaneko, T., Takamaeda-Yamazaki, S., & Imaizumi, M. (2024). *Federated Learning with Relative Fairness*. <http://arxiv.org/abs/2411.01161>
- Nila Isroviyah. (2020). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Penelitian*, 1–23.
- Puspasari, D. (2020). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 65–76. <https://doi.org/10.14710/jdep.3.1.65-76>
- Rasyidi, A. M., Raihan, M. A., Ilmi, M., Zaid, M. N., Aulia, Y., Laili, N. R., Aulia, N., & Auliana, R. (2020). Teori Human Capital. *Jurnal Theory Human Capital*, 2017, 1–15.
- Ravallion, M. (2004). Growth, Inequality, and Poverty: Looking Beyond Averages. *Growth, Inequality, and Poverty: Prospects for Pro-Poor Economic Development*, November. <https://doi.org/10.1093/0199268657.003.0003>
- Rini, G. A. M. C., Suciptawati, N. L. P., & UTARI, I. A. P. A. (2022). Identifikasi Faktor Yang Memengaruhi Gini Ratio Di Indonesia. *E-Jurnal Matematika*, 11(3), 160. <https://doi.org/10.24843/mtk.2022.v11.i03.p376>
- Sabillah, R., & Sabillah, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kota Metro Dalam Persepektif

Ekonomi Islam. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 4(1), 62.
<https://doi.org/10.24042/slm.v4i1.15955>

Sen, A. (1999). *Development as Freedom* (O. U. Press (ed.); Book 1). Oxford University Press.

Sihombing, V. A., Ratna, E., Sipahutar, A., Susanti, A., Aryani, A., & Firnanda, F. B. (2022). *Hubungan Perekonomian Dengan Kesehatan Dalam Penerapan Evidence Based Practice Di Era 4 . 0 Dengan Sikap Yang Inovatif , Kreatif dan Komunikatif Dalam Masyarakat Stikes Mitra Husada Medan / Program Diploma Tiga Kebidanan Email : vertiangeliasihombing@gmail.*

Sirait, R. A. (2022). *Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia : Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru , Bank Sampah : Pengolahan Sampah Yang Belum Dioptimalkan Menilik Peremajaan Sawit Rakyat Dewan Redaksi Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia : Bank Sampah : Pengolahan Sampah Ya. VII(September).*

Sri Indriyani S Dai, Syarwani Canon, D. O. B. (2023). Analisis pengaruh rls, pengeluaran perkapita, uhh, dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kbi dan kti. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 535–544.

Suryadinata, D. M., Bahtiar, N. S., & Hidayah, A. N. (2023). Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains*, 02.

Tjiabrata, A., Engka, D. S. M., & Rompas, W. F. I. (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 90–101.

Wardhana, A., & Kharisma, B. (2020). Angka Harapan Hidup Di Era Desentralisasi (Kabupaten / Kota Jawa Barat) ISSN : 2337-3067. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, August.
<https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i05.p02>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
1	Kabupaten Nias	2010	0,3165	4,59	68,45	26,4
		2011	0,2352	4,63	68,58	25,39
		2012	0,2276	4,67	68,69	24,99
		2013	0,2776	4,71	68,77	23,28
		2014	0,2624	4,75	68,87	22,21
		2015	0,2491	4,76	68,97	24,53
		2016	0,2735	4,92	69,07	24,11
		2017	0,2491	4,93	69,18	24,88
		2018	0,2645	4,94	69,43	22,61
		2019	0,274	5,15	69,68	22,1
		2020	0,2512	5,36	69,75	23,12
		2021	0,2452	5,64	69,78	24,33
		2022	0,275	5,88	70,06	23,23
		2023	0,279	6,14	71,74	21,99
2	Kabupaten Mandailing Natal	2010	0,2718	7,27	60,6	50,9
		2011	0,291	7,39	60,77	49,05
		2012	0,3186	7,47	60,95	48,38
		2013	0,2763	7,52	61,08	40,69
		2014	0,2791	7,54	61,18	39,68
		2015	0,2874	7,63	61,58	47,79
		2016	0,27	7,89	61,77	47,67
		2017	0,2523	8	61,97	48,3
		2018	0,2574	8,11	62,24	42,39
		2019	0,2623	8,36	62,51	40,64
		2020	0,2478	8,62	62,6	41,31
		2021	0,2403	8,63	62,65	43,24
		2022	0,244	8,76	63,05	40,98
		2023	0,249	8,84	71,72	41,04
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	2010	0,2152	7,87	62,42	31,5
		2011	0,2599	7,92	62,64	30,39
		2012	0,2777	7,96	62,87	29,91
		2013	0,2523	8,04	63,04	30,77
		2014	0,2264	8,22	63,14	29,38
		2015	0,2349	8,27	63,74	31,2
		2016	0,2729	8,35	64,01	30,84
		2017	0,2528	8,67	64,28	29,48
		2018	0,2727	8,7	64,55	25,63
		2019	0,2467	8,97	64,82	24,22
		2020	0,2022	9,28	64,91	23,96
		2021	0,2564	9,29	64,97	25,01
		2022	0,209	9,34	65,28	23,05
		2023	0,219	9,51	71,61	20,09
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	2010	0,3007	7,36	66,43	52,2
		2011	0,365	7,41	66,45	50,21
		2012	0,3291	7,45	66,46	49,61
		2013	0,3079	7,5	66,47	52

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
		2014	0,3027	7,55	66,49	49,86
		2015	0,3588	8,02	66,59	52,2
		2016	0,3062	8,03	66,62	51,77
		2017	0,3058	8,28	66,66	53,05
		2018	0,3174	8,29	66,82	48,53
		2019	0,309	8,48	67,08	46,99
		2020	0,335	8,62	67,15	47,19
		2021	0,2917	8,84	67,24	49,95
		2022	0,233	8,86	67,58	47,07
		2023	0,241	8,87	71,76	47,09
5	Kabupaten Tapanuli Utara	2010	0,2897	8,54	66,76	34,9
		2011	0,347	8,6	66,91	33,57
		2012	0,3542	8,79	67,05	33,09
		2013	0,3003	9,04	67,15	33,75
		2014	0,3045	9,05	67,25	32,23
		2015	0,3558	9,31	67,55	33,37
		2016	0,3087	9,32	67,71	33,2
		2017	0,3289	9,46	67,86	33,75
		2018	0,2819	9,65	68,11	29,2
		2019	0,3065	9,71	68,46	28,57
		2020	0,2867	9,85	68,63	28,41
		2021	0,2766	9,99	68,76	29,72
		2022	0,242	10	69,16	27,47
		2023	0,262	10,09	74,1	26,39
6	Kabupaten Toba	2010	0,316	9,67	68,59	17,6
		2011	0,3152	9,71	68,72	16,93
		2012	0,3395	9,75	68,86	16,64
		2013	0,3437	9,79	68,94	16,96
		2014	0,3017	9,83	69,04	16,51
		2015	0,328	10,08	69,14	18,31
		2016	0,3077	10,09	69,25	18,2
		2017	0,2922	10,1	69,36	18,49
		2018	0,3279	10,34	69,59	15,82
		2019	0,2753	10,36	69,93	15,78
		2020	0,2903	10,52	70,08	16,05
		2021	0,2719	10,57	70,29	16,61
		2022	0,305	10,58	70,76	16,48
		2023	0,295	10,59	74,22	14,94
7	Kabupaten Labuan Batu	2010	0,2293	8,17	69,16	44,3
		2011	0,2998	8,32	69,19	42,61
		2012	0,3035	8,46	69,22	42,08
		2013	0,3275	8,6	69,24	38,14
		2014	0,2962	8,68	69,26	37,35
		2015	0,3062	8,75	69,36	41,63
		2016	0,3082	8,78	69,4	41,94
		2017	0,2792	9,01	69,44	42,35
		2018	0,2936	9,04	69,6	41,7

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
		2019	0,2767	9,23	69,86	41,52
		2020	0,2715	9,24	69,93	42,17
		2021	0,2564	9,25	69,95	45,03
		2022	0,278	9,4	70,37	43,27
		2023	0,244	9,49	72,88	42,58
8	Kabupaten Asahan	2010	0,2495	7,57	66,85	76,3
		2011	0,31	7,71	66,98	73,39
		2012	0,3333	7,8	67,1	72,32
		2013	0,2634	7,89	67,17	80,54
		2014	0,2768	7,98	67,27	76,97
		2015	0,2742	8,32	67,37	85,16
		2016	0,2826	8,33	67,47	84,35
		2017	0,2668	8,46	67,57	83,67
		2018	0,2912	8,47	67,79	74,14
		2019	0,2793	8,49	68,11	70,53
		2020	0,2605	8,79	68,26	66,32
		2021	0,2441	8,8	68,37	69,29
		2022	0,255	8,82	68,73	64,49
		2023	0,26	8,83	73,39	61,69
9	Kabupaten Simalungun	2010	0,3137	8,31	69,87	87,7
		2011	0,2993	8,33	69,98	84,35
		2012	0,3212	8,35	70,08	83,09
		2013	0,3286	8,37	70,14	87,72
		2014	0,3557	8,7	70,24	86,25
		2015	0,3186	8,8	70,34	92,89
		2016	0,296	8,86	70,43	92,19
		2017	0,2554	8,95	70,53	91,35
		2018	0,2897	9,18	70,75	80,3
		2019	0,2738	9,36	71,07	76,33
		2020	0,295	9,6	71,22	73,64
		2021	0,2641	9,61	71,37	76,99
		2022	0,262	9,63	71,78	72,47
		2023	0,295	9,72	74,08	69,21
10	Kabupaten Dairi	2010	0,2536	8,29	66,92	26,9
		2011	0,2752	8,41	67,09	25,87
		2012	0,2889	8,54	67,26	25,49
		2013	0,2769	8,58	67,38	24
		2014	0,2745	8,59	67,48	23,35
		2015	0,2787	8,69	67,78	25,33
		2016	0,3006	8,7	67,95	24,94
		2017	0,2403	8,9	68,13	24,98
		2018	0,2649	9,15	68,41	23,19
		2019	0,2873	9,34	68,79	21,86
		2020	0,2706	9,58	69	22,93
		2021	0,2268	9,59	69,19	23,72
		2022	0,221	9,72	69,64	22,53
		2023	0,241	9,88	74,13	21,42

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
11	Kabupaten Karo	2010	0,2583	8,88	70,29	38,7
		2011	0,3035	9,03	70,32	37,22
		2012	0,2872	9,17	70,34	36,71
		2013	0,2865	9,25	70,38	36,93
		2014	0,271	9,33	70,42	35,36
		2015	0,3368	9,5	70,62	37,52
		2016	0,3283	9,51	70,69	38,74
		2017	0,2678	9,54	70,77	40,02
		2018	0,2682	9,55	70,97	35,36
		2019	0,2642	9,62	71,27	34,08
		2020	0,2706	9,79	71,4	36,57
		2021	0,2327	10	71,58	38,01
		2022	0,236	10,02	72,03	35,93
		2023	0,24	10,03	74,16	35,65
12	Kabupaten Deli Serdang	2010	0,2444	9,19	70,74	96
		2011	0,2722	9,2	70,75	92,33
		2012	0,3014	9,21	70,76	91,19
		2013	0,2748	9,37	70,78	91,97
		2014	0,2724	9,46	70,8	90,92
		2015	0,3159	9,48	71	95,65
		2016	0,2823	9,68	71,06	100,09
		2017	0,2814	9,7	71,11	97,09
		2018	0,2935	9,92	71,31	88,52
		2019	0,2732	10,08	71,61	84,94
		2020	0,312	10,09	71,73	86,26
		2021	0,2628	10,1	71,77	92,52
		2022	0,27	10,27	72,07	85,28
		2023	0,295	10,28	73,65	82,75
13	Kabupaten Langkat	2010	0,2389	7,48	66,86	104,8
		2011	0,3062	7,59	67	100,8
		2012	0,3115	7,69	67,14	99,27
		2013	0,308	7,69	67,23	104,31
		2014	0,2787	7,85	67,33	100,63
		2015	0,2674	7,92	67,63	114,19
		2016	0,2834	8,18	67,79	115,79
		2017	0,2489	8,51	67,94	114,41
		2018	0,2534	8,52	68,22	105,46
		2019	0,266	8,64	68,59	103,08
		2020	0,2378	8,65	68,8	101,87
		2021	0,2381	8,66	68,97	106,59
		2022	0,26	8,68	69,39	100,45
		2023	0,257	8,73	74,14	98,16
14	Kabupaten Nias Selatan	2010	0,293	3,35	66,82	60,1
		2011	0,2406	3,75	66,91	57,8
		2012	0,2259	3,8	67,01	56,94
		2013	0,2069	4,28	67,06	56,96
		2014	0,2354	4,64	67,16	54,46

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
		2015	0,2411	4,64	67,66	58,97
		2016	0,2136	4,65	67,83	57,75
		2017	0,2694	4,95	68	57,95
		2018	0,3295	5,2	68,24	52,7
		2019	0,3186	5,53	68,58	52,51
		2020	0,2865	5,85	68,74	53,88
		2021	0,2411	6,06	68,86	55,16
		2022	0,223	6,23	69,21	54,16
		2023	0,261	6,48	71,61	54,29
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	2010	0,3014	8,57	67,42	18,2
		2011	0,2755	8,65	67,52	17,5
		2012	0,2762	8,76	67,63	17,25
		2013	0,2565	8,8	67,7	17,94
		2014	0,2226	8,88	67,8	17,14
		2015	0,2666	8,9	68,1	18,04
		2016	0,275	8,91	68,26	18,04
		2017	0,2982	9,1	68,41	18,35
		2018	0,2909	9,28	68,69	16,93
		2019	0,2893	9,53	69,06	16,6
		2020	0,2464	9,54	69,27	17,92
		2021	0,3043	9,71	69,51	18,71
		2022	0,258	10	70,02	17,33
		2023	0,256	10,01	74,07	17,14
16	Kabupaten Pakpak Bharat	2010	0,2974	7,45	64,35	5,6
		2011	0,2675	7,77	64,37	5,39
		2012	0,3016	8,08	64,39	5,32
		2013	0,3121	8,25	64,42	4,94
		2014	0,2769	8,39	64,45	4,72
		2015	0,3031	8,45	64,85	5,12
		2016	0,2644	8,46	64,95	4,95
		2017	0,2555	8,47	65,05	4,95
		2018	0,2393	8,48	65,27	4,66
		2019	0,2791	8,73	65,59	4,52
		2020	0,2475	9,03	65,74	4,59
		2021	0,2421	9,14	65,96	4,79
		2022	0,274	9,39	66,44	4,52
		2023	0,251	9,61	72,61	4,01
17	Kabupaten Samosir	2010	0,3204	8,36	69,23	19,7
		2011	0,2744	8,41	69,36	18,95
		2012	0,3038	8,46	69,48	18,48
		2013	0,3306	8,52	69,56	17,18
		2014	0,3183	8,57	69,66	16,27
		2015	0,2875	8,84	70,26	17,64
		2016	0,2764	8,94	70,47	18,01
		2017	0,287	8,95	70,68	18,43
		2018	0,2846	9,14	70,87	16,81
		2019	0,301	9,15	71,16	15,79

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
		2020	0,3175	9,43	71,27	15,8
		2021	0,2735	9,44	71,41	16,08
		2022	0,298	9,46	71,82	14,97
		2023	0,251	9,47	74,1	14,86
18	Kabupaten Serdang Bedagai	2010	0,2453	7,69	66,66	62,8
		2011	0,265	7,74	66,84	60,5
		2012	0,2843	7,78	67,03	59,53
		2013	0,2537	8,02	67,17	56,55
		2014	0,2599	8,04	67,27	54,48
		2015	0,2906	8,08	67,47	58,3
		2016	0,2545	8,34	67,63	58,17
		2017	0,2754	8,35	67,79	56,93
		2018	0,2828	8,51	68,08	50,49
		2019	0,2571	8,53	68,46	48,69
		2020	0,262	8,54	68,68	49,18
		2021	0,2287	8,69	68,82	51,16
		2022	0,24	8,71	69,21	48,22
		2023	0,225	8,85	73,11	45,88
19	Kabupaten Batu Bara	2010	0,2184	7,41	65,06	46
		2011	0,2904	7,47	65,19	44,34
		2012	0,2461	7,53	65,32	43,66
		2013	0,2501	7,7	65,4	46,86
		2014	0,2109	7,72	65,5	44,72
		2015	0,283	7,74	65,8	50,37
		2016	0,2676	7,75	65,95	49,42
		2017	0,2335	7,83	66,1	50,91
		2018	0,2494	7,84	66,38	51,78
		2019	0,2773	8,02	66,75	50,46
		2020	0,2592	8,06	66,96	49,78
		2021	0,2396	8,07	67,13	52,59
		2022	0,243	8,26	67,55	49,39
		2023	0,255	8,5	72,63	49,18
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2010	0,2312	8,37	66,31	25
		2011	0,241	8,39	66,33	24,04
		2012	0,2797	8,4	66,36	23,72
		2013	0,2152	8,41	66,38	25,01
		2014	0,2336	8,44	66,4	23,86
		2015	0,2689	8,91	66,5	27,67
		2016	0,2525	8,92	66,54	27,88
		2017	0,2498	8,93	66,58	27,98
		2018	0,2989	9,06	66,77	26,82
		2019	0,2702	9,1	67,06	26,06
		2020	0,2283	9,37	67,17	26,79
		2021	0,2547	9,38	67,22	28,37
		2022	0,245	9,46	67,53	26,09
		2023	0,241	9,55	71,57	26,17
21	Kabupaten Padang Lawas	2010	0,2527	7,65	65,84	25

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
		2011	0,2746	7,97	65,89	24,04
		2012	0,3074	8,13	65,93	23,64
		2013	0,2571	8,14	65,97	21,23
		2014	0,2534	8,16	66,01	20,34
		2015	0,2969	8,4	66,31	22,38
		2016	0,3256	8,41	66,4	22,8
		2017	0,2482	8,43	66,5	24,42
		2018	0,2985	8,67	66,69	23,05
		2019	0,2313	8,69	66,98	23,17
		2020	0,2653	9,01	67,09	23,87
		2021	0,2525	9,02	67,13	25,78
		2022	0,227	9,31	67,43	24,45
		2023	0,225	9,43	71,52	24,51
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2010	0,2547	7,49	67,97	43,4
		2011	0,2213	7,73	67,99	41,74
		2012	0,2296	7,95	68,01	41,21
		2013	0,2228	8,25	68,03	37,33
		2014	0,2274	8,67	68,06	35,65
		2015	0,2611	8,68	68,09	36,37
		2016	0,2435	8,69	68,11	36,62
		2017	0,2197	8,7	68,14	37,82
		2018	0,2427	8,71	68,39	33,14
		2019	0,2497	8,74	68,64	30,17
		2020	0,1935	8,75	68,71	28,63
		2021	0,2317	8,9	68,81	30,36
		2022	0,247	8,92	69,16	29,38
		2023	0,231	8,93	72,46	29,83
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2010	0,2438	7,44	68,17	40,9
		2011	0,2505	7,75	68,27	39,34
		2012	0,2531	7,92	68,36	38,68
		2013	0,2388	8,1	68,4	39,09
		2014	0,2379	8,27	68,5	37,3
		2015	0,3001	8,31	68,7	39,59
		2016	0,2549	8,33	68,8	38,81
		2017	0,2665	8,34	68,91	40,24
		2018	0,2819	8,35	69,09	36,45
		2019	0,2668	8,36	69,37	34,76
		2020	0,2624	8,4	69,46	34,86
		2021	0,2431	8,41	69,56	37,13
		2022	0,276	8,64	69,91	33,91
		2023	0,238	8,87	74,06	34,13
24	Kabupaten Nias Utara	2010	0,2858	5,25	68,12	40,7
		2011	0,2543	5,36	68,23	39,15
		2012	0,2996	5,46	68,33	38,51
		2013	0,2642	5,55	68,39	40,78
		2014	0,2523	6,05	68,49	38,95
		2015	0,2608	6,06	68,59	43,74

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
		2016	0,266	6,07	68,68	41,66
		2017	0,2685	6,08	68,77	39,47
		2018	0,2374	6,09	68,98	36,33
		2019	0,2844	6,25	69,29	34,42
		2020	0,2506	6,58	69,43	34,74
		2021	0,2359	6,77	69,55	35,84
		2022	0,239	6,78	69,9	32,87
		2023	0,228	6,85	72,12	30,78
25	Kabupaten Nias Barat	2010	0,2918	4,65	67,15	25,1
		2011	0,3592	4,78	67,31	24,24
		2012	0,2471	5,18	67,44	23,84
		2013	0,2109	5,25	67,54	24,88
		2014	0,2199	5,73	67,64	23,76
		2015	0,2524	5,74	67,94	25,41
		2016	0,2899	5,77	68,1	24,16
		2017	0,2469	5,78	68,28	23,33
		2018	0,2833	6	68,5	23
		2019	0,2578	6,14	68,82	22,08
		2020	0,2339	6,49	68,96	22,33
		2021	0,2238	6,69	69,08	21,75
		2022	0,21	6,97	69,43	20,42
		2023	0,208	7,07	72,3	18,86
26	Kota Sibolga	2010	0,2972	9,33	66,82	11,7
		2011	0,3223	9,53	67	11,25
		2012	0,3366	9,53	67,17	11,13
		2013	0,3219	9,73	67,3	11,08
		2014	0,3106	9,83	67,4	10,57
		2015	0,3541	9,85	67,7	11,64
		2016	0,3442	9,86	67,87	11,54
		2017	0,3234	9,87	68,05	11,91
		2018	0,3032	9,91	68,36	10,81
		2019	0,2718	10,18	68,77	10,82
		2020	0,2912	10,4	69,01	10,49
		2021	0,2764	10,41	69,25	10,8
		2022	0,346	10,43	69,77	10,05
		2023	0,246	10,44	74,02	10,02
27	Kota Tanjungbalai	2010	0,2826	8,53	60,96	25,2
		2011	0,3317	8,66	61,09	24,24
		2012	0,3514	8,88	61,23	23,86
		2013	0,3348	8,9	61,3	24,2
		2014	0,29	9,03	61,4	23,17
		2015	0,3647	9,12	61,9	25,09
		2016	0,3726	9,13	62,09	24,42
		2017	0,2784	9,14	62,28	24,69
		2018	0,332	9,24	62,6	25,3
		2019	0,2678	9,26	63,02	24,54
		2020	0,2716	9,44	63,27	23,54

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
		2021	0,2477	9,45	63,44	24,1
		2022	0,245	9,55	63,87	22,65
		2023	0,238	9,68	74,01	22,45
28	Kota Pematangsiantar	2010	0,2551	10,39	71,44	27,5
		2011	0,3209	10,43	71,51	26,45
		2012	0,3189	10,62	71,57	26,01
		2013	0,3124	10,62	71,59	26,61
		2014	0,2938	10,7	71,69	25,43
		2015	0,3579	10,73	72,29	25,83
		2016	0,3213	10,75	72,46	24,88
		2017	0,3494	11,06	72,63	25,35
		2018	0,334	11,08	72,93	22,01
		2019	0,3298	11,15	73,33	21,99
		2020	0,3362	11,16	73,55	21,23
		2021	0,3076	11,29	73,77	22,06
		2022	0,321	11,31	74,25	20,53
		2023	0,329	11,58	74,75	18,96
29	Kota Tebing Tinggi	2010	0,3154	9,5	69,8	18,9
		2011	0,324	9,69	69,87	18,27
		2012	0,2931	9,86	69,92	18,02
		2013	0,2864	10,04	69,94	17,98
		2014	0,3139	10,05	70,04	17,2
		2015	0,3982	10,06	70,14	18,8
		2016	0,3577	10,07	70,21	18,52
		2017	0,3035	10,09	70,28	19,06
		2018	0,3396	10,24	70,47	16,64
		2019	0,3237	10,28	70,76	16,3
		2020	0,3337	10,31	70,87	16,32
		2021	0,344	10,44	70,95	17,37
		2022	0,334	10,65	71,29	16,34
		2023	0,317	10,86	74,07	16,36
30	Kota Medan	2010	0,361	10,54	71,98	212,3
		2011	0,3269	10,63	72,03	204,19
		2012	0,394	10,72	72,08	201,06
		2013	0,3959	10,76	72,13	209,69
		2014	0,322	10,88	72,18	200,32
		2015	0,3739	11	72,28	207,5
		2016	0,3328	11,18	72,34	206,87
		2017	0,352	11,25	72,4	204,22
		2018	0,3144	11,37	72,64	186,45
		2019	0,3519	11,38	72,98	183,79
		2020	0,3199	11,39	73,14	183,54
		2021	0,402	11,48	73,23	193,03
		2022	0,399	11,5	73,58	187,74
		2023	0,373	11,62	74,76	187,28
31	Kota Binjai	2010	0,2598	9,48	71,2	18
		2011	0,3705	9,61	71,25	17,41

No	Wilayah	Tahun	Gini	RLS	AHH	JPM
		2012	0,2693	9,74	71,29	17,16
		2013	0,2603	9,75	71,34	17,48
		2014	0,3084	9,77	71,39	16,72
		2015	0,2517	10,28	71,59	18,6
		2016	0,3155	10,28	71,67	17,8
		2017	0,3163	10,58	71,75	18,23
		2018	0,3085	10,75	71,95	16,07
		2019	0,3511	10,77	72,25	15,61
		2020	0,3244	10,93	72,38	15,91
		2021	0,2903	10,94	72,45	16,46
		2022	0,302	11,18	72,79	14,61
		2023	0,318	11,19	74,18	13,85
32	Kota Padangsidempuan	2010	0,3014	10,02	68,08	20,3
		2011	0,3339	10,04	68,13	19,52
		2012	0,3393	10,05	68,18	19,24
		2013	0,3179	10,1	68,22	18,44
		2014	0,319	10,13	68,27	17,65
		2015	0,3166	10,47	68,32	18,36
		2016	0,3335	10,48	68,37	17,65
		2017	0,3236	10,56	68,41	17,76
		2018	0,3593	10,63	68,73	16,79
		2019	0,3098	10,7	69,15	16,06
		2020	0,3538	11	69,41	16,56
		2021	0,3101	11,09	69,5	17,28
		2022	0,275	11,11	69,84	16,03
		2023	0,267	11,12	73,54	16,15
33	Kota Gunungsitoli	2010	0,4268	7,05	69,98	42,5
		2011	0,3532	7,2	70,03	40,97
		2012	0,3445	7,55	70,08	40,4
		2013	0,3247	8,16	70,13	41,1
		2014	0,3477	8,17	70,19	37,2
		2015	0,3674	8,18	70,29	34,47
		2016	0,3569	8,2	70,36	32,17
		2017	0,3463	8,4	70,42	30,08
		2018	0,3608	8,41	70,67	25,91
		2019	0,3183	8,58	71,02	23,06
		2020	0,3223	8,61	71,19	23,54
		2021	0,3166	8,62	71,32	24,02
		2022	0,303	8,64	71,71	21,85
		2023	0,308	8,65	74,03	22,03

Lampiran 2 Hasil *Common Effect Model*

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 05/08/25 Time: 00:04

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 448

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.170602	0.044255	3.854942	0.0001
RLS	0.008942	0.001227	7.285391	0.0000
AHH	4.20E-06	6.90E-06	0.608909	0.5429
JPM	1.55E-06	4.97E-07	3.118903	0.0019
Root MSE	0.037165	R-squared		0.155822
Mean dependent var	0.283683	Adjusted R-squared		0.150118
S.D. dependent var	0.040495	S.E. of regression		0.037332
Akaike info criterion	-3.729029	Sum squared resid		0.618802
Schwarz criterion	-3.692379	Log likelihood		839.3026
Hannan-Quinn criter.	-3.714582	F-statistic		27.31851
Durbin-Watson stat	0.820694	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 3 Hasil *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 05/08/25 Time: 00:24

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 448

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.619908	0.071726	8.642692	0.0000
RLS	-0.008631	0.003800	-2.271468	0.0236
AHH	-3.77E-05	1.16E-05	-3.259436	0.0012
JPM	-5.42E-07	3.78E-06	-0.143254	0.8862

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.025891	R-squared	0.590309
Mean dependent var	0.283683	Adjusted R-squared	0.556582
S.D. dependent var	0.040495	S.E. of regression	0.026966
Akaike info criterion	-4.313597	Sum squared resid	0.300313
Schwarz criterion	-3.992910	Log likelihood	1001.246
Hannan-Quinn criter.	-4.187179	F-statistic	17.50228
Durbin-Watson stat	1.704447	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 4 Hasil *Random Effect Model*

Dependent Variable: GINI
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/08/25 Time: 00:05
Sample: 2010 2023
Periods included: 14
Cross-sections included: 32
Total panel (balanced) observations: 448
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.517217	0.054543	9.482776	0.0000
RLS	0.002889	0.002293	1.259614	0.2085
AHH	-3.93E-05	9.05E-06	-4.341494	0.0000
JPM	2.72E-06	1.09E-06	2.506506	0.0125
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.022189	0.4037
Idiosyncratic random			0.026966	0.5963
Weighted Statistics				
Root MSE	0.028107	R-squared		0.052588
Mean dependent var	0.087633	Adjusted R-squared		0.046187
S.D. dependent var	0.028908	S.E. of regression		0.028233
Sum squared resid	0.353912	F-statistic		8.215066
Durbin-Watson stat	1.447641	Prob(F-statistic)		0.000025
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.038757	Mean dependent var		0.283683
Sum squared resid	0.761433	Durbin-Watson stat		0.672859

Lampiran 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.128928	(31,413)	0.0000
Cross-section Chi-square	323.886405	31	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 05/08/25 Time: 00:29

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 448

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.170602	0.044255	3.854942	0.0001
RLS	0.008942	0.001227	7.285391	0.0000
AHH	4.20E-06	6.90E-06	0.608909	0.5429
JPM	1.55E-06	4.97E-07	3.118903	0.0019
Root MSE	0.037165	R-squared		0.155822
Mean dependent var	0.283683	Adjusted R-squared		0.150118
S.D. dependent var	0.040495	S.E. of regression		0.037332
Akaike info criterion	-3.729029	Sum squared resid		0.618802
Schwarz criterion	-3.692379	Log likelihood		839.3026
Hannan-Quinn criter.	-3.714582	F-statistic		27.31851
Durbin-Watson stat	0.820694	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	45.711475	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
RLS	-0.008631	0.002889	0.000009	0.0001
AHH	-0.000038	-0.000039	0.000000	0.8207
JPM	-0.000001	0.000003	0.000000	0.3675

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 05/08/25 Time: 00:09

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 448

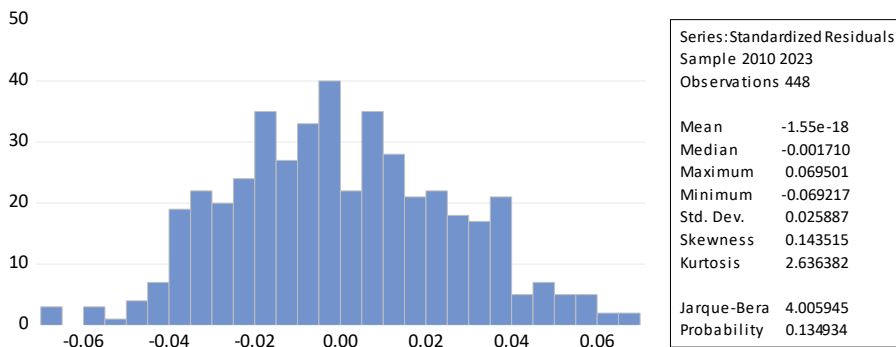
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.619908	0.071726	8.642692	0.0000
RLS	-0.008631	0.003800	-2.271468	0.0236
AHH	-3.77E-05	1.16E-05	-3.259436	0.0012
JPM	-5.42E-07	3.78E-06	-0.143254	0.8862

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.025891	R-squared	0.590309
Mean dependent var	0.283683	Adjusted R-squared	0.556582
S.D. dependent var	0.040495	S.E. of regression	0.026966
Akaike info criterion	-4.313597	Sum squared resid	0.300313
Schwarz criterion	-3.992910	Log likelihood	1001.246
Hannan-Quinn criter.	-4.187179	F-statistic	17.50228
Durbin-Watson stat	1.704447	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas



Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinearitas

	RLS	AHH	JPM
RLS	1.000000	0.383779	0.087944
AHH	0.383779	1.000000	0.176513
JPM	0.087944	0.176513	1.000000

Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS_RES

Method: Panel Least Squares

Date: 05/08/25 Time: 00:23

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 448

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.019141	0.071726	0.266856	0.7897
RLS	0.003640	0.003800	0.958057	0.3386
AHH	-8.03E-06	1.16E-05	-0.694495	0.4878
JPM	1.05E-06	3.78E-06	0.276419	0.7824

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.025891	R-squared	0.002276
Mean dependent var	-1.44E-18	Adjusted R-squared	-0.079861
S.D. dependent var	0.025949	S.E. of regression	0.026966
Akaike info criterion	-4.313597	Sum squared resid	0.300313
Schwarz criterion	-3.992910	Log likelihood	1001.246
Hannan-Quinn criter.	-4.187179	F-statistic	0.027709
Durbin-Watson stat	1.704447	Prob(F-statistic)	1.000000